

Dokumen

RINGKASAN PERISTIWA ASEAN Kegiatan-kegiatan ASEAN

Penyusun:
SUDIBYO (Editor),
Yoyok ARIESSUSANTO

I. KERJASAMA ASEAN

A. Kerjasama Industri

1. Industri Semen ASEAN
2. Proyek Industri ASEAN
3. Seminar Keramik ASEAN

B. Kerjasama Perdagangan dan Pariwisata

1. Sidang Tahunan AHPADA
2. Pameran Dagang ASEAN ke-4
3. Pariwisata Mobil ASEAN
4. Musyawarah Komisi Kerja Kelompok-14 (G-14)
5. Pertemuan Kamar Dagang dan Industri ASEAN

C. Kerjasama Kebudayaan dan Informasi

1. Konperensi Menteri Penerangan ASEAN ke-1
 - a. Persiapan Konperensi Menteri Penerangan ASEAN
 - b. Pelaksanaan Konperensi Menteri Penerangan ASEAN ke-1
2. Lokakarya Penggunaan Sistem Radio Cellular
3. ASEAN Worlddidac Expo
4. Festival Lagu ASEAN

D. Kerjasama Kesehatan

1. Simposium ASI se ASEAN
2. Rehabilitasi Pecandu Narkotika
3. Sidang ASOD ke-12
4. Kongres Psikiatri dan Kesehatan Jiwa
5. Pertemuan Konsultasi Kesejahteraan Anak ASEAN

II. MASALAH KEAMANAN ASEAN

A. Seminar Keamanan Regional ASEAN

B. Kerjasama Militer dan Keamanan ASEAN

III. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA-MITRANYA

A. Hubungan ASEAN-UNDP

B. Hubungan ASEAN-MEE

C. Hubungan ASEAN-Amerika Serikat

1. Masalah Kawasan Bebas Senjata Nuklir
2. Laporan Komite Pengarah Hubungan ASEAN-Amerika Serikat
3. Seminar ASEAN-Amerika Serikat

D. Hubungan ASEAN-Jepang

1. Dana Pinjaman Jepang
2. Sikap Pemerintah Jepang terhadap ASEAN
3. Sistem Perdagangan Terbuka Jepang
4. Konperensi ASEAN-Jepang ke-2
5. Kunjungan PM Noboru Takeshita ke ASEAN
6. Jepang dan Asia Mencari Peran Baru
7. Kerjasama Lingkungan ASEAN-Jepang

IV. USAHA ASEAN MEMBANTU MENYELESAIKAN KONFLIK KAMBOJA

A. Pertemuan Hun Sen - Sihanouk di Jakarta

B. Perbedaan Pendapat di antara Faksi-faksi

C. Peranan Uni Soviet dan RRC

D. Rencana KTT Paris Gagal

V. HUBUNGAN ASEAN-VIETNAM

dapi tantangan-tantangan yang akan terjadi dalam waktu dekat; (11) pasar ASEAN harus dimanfaatkan bagi hasil produk anggotanya; (12) tiga ratus juta jiwa penduduk ASEAN merupakan potensi pasar yang besar dan untuk mengubah potensi ini menjadi riil diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan mereka; (13) dari kesepakatan pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN ke-20 untuk menambah 14 proyek ke dalam daftar final dan 5 proyek dalam daftar sementara, baru tiga proyek yang dilaksanakan dengan penyertaan modal non-ASEAN; (14) proyek AIJV tidak mensyaratkan semua negara anggota ASEAN terikat, oleh karena itu dua negara saja sudah dapat berjalan (*Antara*, 7 Juni 1989).

Presiden Dewan Kadin ASEAN, Dr. Arselio Periquet Jr., mengatakan bahwa: (1) kelambanan laju integritas ASEAN menyebabkan kerjasama ekonomi belum mencapai titik optimal; (2) penyebab lambannya kemajuan kerjasama ASEAN banyak dipertanyakan; (3) tingkat pembangunan ekonomi yang hampir sama dan keinginan para anggota ASEAN untuk mencapai status negara industri baru (NICs atau *Newly Industries Countries*) mengakibatkan mereka saling bersaing di berbagai bidang; (4) penanganan perdagangan bebas yang mendadak di ASEAN dapat menimbulkan diskontinuitas yang banyak ditentang oleh kelompok-kelompok negara-negara maju; (5) upaya pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN menimbulkan benturan-benturan kepentingan jangka pendek, tetapi justru akan menguntungkan dalam jangka panjang; (6) pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN diperlukan, mengingat kawasan-kawasan lain telah membentuk blok serupa (*Antara*, 7 Juni 1989).

Penanggung jawab sidang Kadin ASEAN-Dewan Bisnis Kanada, dr. Rosita S. Noor, mengatakan kepada pers di Bali tanggal 6 Juni 1989 bahwa: (1) delegasi Filipina menilai, biaya angkutan di negara-negara ASEAN mahal, oleh sebab itu ASEAN perlu mendirikan perusahaan patungan pembuat kapal angkut dagangan; (2) perusahaan ini diharapkan dapat menekan biaya angkutan kapal ke beberapa pelabuhan di kawasan ASEAN; (3) biaya angkutan ekspor yang mahal membuat produk non-migas di kawasan ini tidak mampu berkompetisi, meskipun bea masuk bagi mata dagangan tertentu relatif kecil; (4) ASEAN harus memperbaiki sistem perekonomiannya agar lebih terbuka dan transparan; (5) penataan dan rangkaian kelompok kerja ASEAN pada sidang Kadin ASEAN ini dilakukan untuk menghadapi mitra dialognya; (6) hasil pembahasan Sidang G-14 akan dijadikan sikap ASEAN dalam per-

temuannya dengan para mitra dialog (*Antara*, 7 Juni 1989).

Sementara itu, Ketua Kadin Indonesia, Sotion Ardjanggi, mengatakan bahwa: (1) kebijaksanaan-kebijaksanaan deregulasi yang dilancarkan pemerintah negara-negara anggota ASEAN merupakan titik tolak yang penting bagi para pengusaha swasta ASEAN untuk melakukan kerjasama; (2) kebijaksanaan deregulasi dapat mendorong terwujudnya proyek kerjasama ASEAN dengan non-ASEAN; (3) usaha patungan swasta non-ASEAN diperbolehkan memiliki saham proyek sampai 60% dan anggota ASEAN minimum; (4) perkapalan dan keuangan merupakan dua sektor yang harus diperhatikan untuk memperluas perdagangan; (5) tanpa tersedianya kapal yang memadai, kerjasama perdagangan dan AIJV tidak dapat berjalan dan terwujud (*Antara*, 8 Juni 1989).

Keputusan sidang antara lain: (1) Kadin ASEAN akan menyampaikan nota keprihatinan atas langkah proteksionisme AS terhadap berbagai jenis komoditi negara-negara ASEAN; (2) nota ini akan dikirimkan kepada Presiden George Bush, Menteri Perdagangan AS dan para dubes AS di negara-negara ASEAN; (3) sidang mengesahkan rencana pembentukan Pusat Studi ASEAN (*Centre for ASEAN Studies*), yang merupakan sekretariat Kadin ASEAN untuk melakukan studi berbagai proyek potensial; (4) usaha untuk mewujudkan pembentukan pusat studi ini akan dibahas lebih lanjut pada Konperensi Kadin ASEAN di Singapura tanggal 27 November 1989; (5) sidang menerima rekomendasi rencana penyelenggaraan Pekan Dagang Yokohama yang berlangsung tanggal 26-31 Juli 1989. Semua negara anggota ASEAN akan mengikuti pekan dagang itu kecuali Malaysia; (6) para pengusaha swasta ASEAN akan menyelenggarakan Pekan Dagang ASEAN di Jakarta tanggal 3-13 Oktober 1989 untuk meningkatkan perdagangan antara ASEAN dan memperkuat ASEAN sebagai pemasok yang andal serta merangsang perdagangan dan investasi (*Antara*, 8 Juni 1989).

Juru bicara pertemuan Kadin ASEAN dengan para mitra dialognya, Achmad Sarbini, mengatakan kepada pers di Bali tanggal 9 Juni 1989 bahwa: (1) dampak negatif pembentukan Pasar Tunggal Eropa 1992, Perseutujuan Perdagangan Bebas AS-Kanada dan Pasaran Bebas Australia-Selandia Baru sangat dikhawatirkan ASEAN; (2) keuntungan ASEAN atas terbentuknya Pasaran Tunggal Eropa adalah ekspor ASEAN yang hanya melalui satu pintu, sedangkan kerugiannya ada-

lah terdapatnya perbedaan sistem waktu kuota antar negara anggota ASEAN; (5) Indonesia mengeluh kepada MEE karena ekspor tapiokanya dibedakan dengan Muangthai. Kuota Indonesia harus diperbarui setiap tahun, sedangkan Muangthai setiap empat tahun; (4) ASEAN, khususnya Indonesia, mengusulkan agar masalah ekspor diperlakukan sama dan secara wajar. MEE memaklumi keluhan itu dan menganjurkan Indonesia untuk menyampaikan penjelasan resmi; (5) mulai sekarang ASEAN harus siap menciptakan kesamaan pandangan antara pemerintah dan dunia usaha ASEAN untuk menghadapi Pasaran Tunggal Eropa; (6) persetujuan perdagangan bebas AS-Kanada dikhawatirkan akan mengurangi perhatian Kanada pada ASEAN; (7) Kanada berkepentingan sekali pada AS karena nilai perdagangannya dengan negara itu mencapai 72%; (8) Kanada menjanjikan bahwa persetujuan dengan AS tidak akan merugikan ASEAN, dalam arti tidak akan ada peraturan yang bersifat proteksionistis; (9) investasi Kanada di ASEAN masih relatif kecil dan masih dapat ditingkatkan; (10) investasi Malaysia dan Singapura di Kanada bergerak di bidang perhotelan, perbankan; (11) terbentuknya perdagangan dan pasaran bebas Australia-Selandia Baru akan menghambat ekspor ASEAN ke Australia, dan dikhawatirkan Australia akan mengalihkan impornya ke Selandia Baru; (12) Selandia Baru sepakat untuk membicarakan masalah ini dengan ASEAN, khususnya Indonesia; (13) Selandia Baru meminta daftar barang dagangan ASEAN yang diekspor ke Australia; (14) hingga saat ini dampak positif pasaran bebas Australia-Selandia Baru belum diketahui; (15) ASEAN mengajukan sejumlah pendekatan kepada mitra dialog seperti: (a) anggota ASEAN agar diperlakukan sama di Pasaran Tunggal Eropa; (b) Kanada agar meningkatkan investasinya di ASEAN dan melanjutkan sidang Kadin dengan dewan pengusaha Kanada pada akhir tahun 1989; (c) Selandia Baru agar sungguh-sungguh memperhatikan daftar barang ASEAN, khususnya Indonesia, yang diekspor ke Australia; (d) Selandia Baru agar meningkatkan kerjasama dengan ASEAN di bidang peternakan dan kehutanan; (16) dialog ini sangat penting untuk mengantisipasi perkembangan dan peluang ekonomi di masa mendatang (*Antara*, 10 Juni 1989).

Seusai penutupan pertemuan Kadin ASEAN dengan para mitra dialognya, juru bicara pertemuan Achmad Sarbini mengatakan kepada pers tanggal 9 Juni 1989 bahwa: (1) dewasa ini mekanisme perdagangan intra ASEAN masih bertumpu pada kelancaran angkutan kapal laut, pengadaan bahan baku dan pemasaran se-

jumlah produk ekspor; (2) masalah transportasi, komunikasi dan perdagangan dibicarakan secara intensif dan disarankan agar dibenahi; (3) angkutan kapal sekarang ini merugikan negara-negara berkembang karena tarifnya ditentukan oleh pemilik kapal, yang umumnya dimiliki oleh negara maju; (4) pelayaran lintas reguler sangat penting untuk kelancaran ekspor-impor; (5) hingga sekarang pelayaran lintas reguler antar sejumlah pelabuhan di ASEAN belum ada; (6) kelompok kerja perdagangan mengusulkan agar dibentuk asosiasi pengguna jasa dan pemilik kapal untuk menekan biaya angkutan; (7) hubungan kapal laut intra ASEAN sangat menentukan kelancaran ekspor-impor antar anggotanya; (8) ASEAN perlu membentuk semacam *sogo shosha* seperti yang dilaksanakan di Jepang; (9) kelompok kerja perdagangan sepakat untuk: (a) mempelajari pembelian bahan baku bagi para pengusaha industri menengah dan kecil di ASEAN; (b) membentuk organisasi pemasaran guna membantu ekspor perusahaan menengah dan kecil di ASEAN; (c) meningkatkan kerjasama antar pengusaha di ASEAN; (d) mengadakan seminar kerajinan tangan ASEAN di Bali pada bulan Juli 1989; (10) kelompok kerja industri sepakat agar: (a) perdagangan antar negara ASEAN diperlancar; (b) pemerintah-pemerintah ASEAN menetapkan standar perdagangan; (c) standar perdagangan yang perlu diwujudkan memakai standar perdagangan internasional; (11) kelompok kerja pangan sepakat untuk: (a) meningkatkan kerjasama pengembangan sumber daya alam, pangan, perikanan, kehutanan dan pemberantasan penyakit hewan; (b) membentuk restoran ASEAN yang menawarkan makanan dan menu ASEAN; (c) memperbaiki mutu makanan melalui penelitian yang akan dilaporkan kepada Komite Pangan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; (d) melakukan kerjasama di beberapa sektor yang akan dituangkan ke dalam suatu proyek bersama di bidang pangan, pertanian, kehutanan dan transportasi serta komunikasi seperti yang tertuang dalam usaha patungan industri ASEAN (AIJV); (e) mengadakan dialog lanjutan di Brunei Darussalam tanggal 22-25 Agustus 1989 (*Antara*, 10 Juni 1989).

C. KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN INFORMASI

1. Konperensi Menteri Penerangan ASEAN ke-1

a. Persiapan Konperensi Menteri Penerangan ASEAN

Menteri Penerangan RI, Harmoko mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 16 Mei 1989 bahwa: (1)

Konferensi Menpen ASEAN ke-1 yang akan diselenggarakan di Jakarta diharapkan dapat mendekatkan hubungan antar pribadi para Menteri Penerangan ASEAN untuk membina kerjasama yang lebih baik; (2) konferensi ini mengacu pada hasil KTT Manila serta sidang Komite Kebudayaan dan Informasi tahun 1987; (3) telah saatnya para Menteri Penerangan ASEAN membicarakan pembentukan Tata Informasi dan Komunikasi Dunia Baru; (4) kerjasama bilateral antar anggota yang telah baik dan hasil KTT Manila 1987 merupakan landasan tata informasi ASEAN (*Antara*, 17 Mei 1989).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Penerangan RI, Drs. F. Rachmadi mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 17 Mei 1989 bahwa tujuan konferensi Menteri Penerangan ASEAN ke-1 adalah untuk: (1) meningkatkan kerjasama ASEAN secara fungsional; (2) saling mendalami cita-cita ASEAN sehingga dapat menyerap aspirasi politik dan ekonomi guna kepentingan rakyat; (3) memupuk pengertian yang lebih kuat antar anggota ASEAN mengenai identitas regional masing-masing; (4) menghargai latar belakang sejarah, wilayah, sumber alam dan berbagai aspek lainnya di wilayah ASEAN; (5) mengupayakan peningkatan kerjasama di bidang media massa, pertukaran ahli media elektronika, kantor berita dan alih teknologi informasi (*Antara*, 18 Juni 1989).

Pertemuan para pejabat senior bidang penerangan ASEAN (*Senior Official Meeting* atau SOM) yang berlangsung di Jakarta tanggal 21-22 Mei 1989 itu dihadiri oleh para delegasi dari Filipina yang dipimpin oleh Asisten Menteri Kantor Kebudayaan dan Jasa-jasa Penerangan pada Departemen Luar Negeri Jorge Lorredo, Brunei Darussalam dipimpin oleh Setia Usaha Tetap Jabatan Perdana Menteri Pehin Udana Khatib Dato Paduka Ustaz Awang Haji Badaruddin, Malaysia yang dipimpin oleh Sekjen Kementerian Penerangan Dato Dr. Mohd. Nor bin Abdul Ghani, Singapura dipimpin oleh Direktur Penerangan Kementerian Perhubungan dan Penerangan James Fu Chiao Sian, dan Muangthai dipimpin oleh Dirjen Departemen Hubungan Masyarakat Kantor Perdana Menteri Menit Varin dan Indonesia dipimpin oleh Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika Dr. Janner Sinaga, untuk mempersiapkan dokumentasi dan masalah administrasi konferensi Menteri Penerangan ASEAN ke-1 (*Antara*, 20 Mei 1989).

Antara tanggal 22 Mei 1989 memberitakan bahwa pertemuan SOM yang berlangsung tertutup itu untuk: (1) membahas usaha peningkatan kerjasama pers dan televisi, radio, film dan video antar negara ASEAN; (2)

membahas rancangan deklarasi Menteri Penerangan ASEAN dan rancangan pernyataan bersama; (3) memilih Ketua dan Wakil Ketua SOM serta menyusun agenda pertemuan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hasil-hasil pertemuan SOM ini akan diserahkan kepada konferensi Menteri Penerangan ASEAN untuk mendapat pengesahan (*Antara*, 22 Mei 1989).

b. Pelaksanaan Konferensi Menteri Penerangan ASEAN ke-1

Konferensi Menteri Penerangan ASEAN ke-1 yang berlangsung di Jakarta tanggal 24-25 Mei 1989, dihadiri oleh 54 orang peserta terdiri atas 17 orang wakil Indonesia, 8 orang wakil Malaysia, 7 orang wakil Filipina, 11 orang wakil Singapura, 5 orang wakil Muangthai dan 6 orang wakil Brunei Darussalam untuk membahas: (1) peningkatan arus informasi ASEAN melalui kantor berita, surat kabar dan media elektronik; (2) peningkatan kualitas insan penerangan di ASEAN melalui pelaksanaan pendidikan dan latihan; (3) usaha penurunan tarif telekomunikasi bagi pertukaran informasi dan berita antar ASEAN, termasuk penggunaan jasa satelit (*Antara*, 22 Mei 1989).

Pembantu Perdana Menteri Muangthai bidang Penerangan, Kuning Supara Masdit, mengatakan kepada pers di Bandara Soekarno-Hatta tanggal 23 Mei 1989 bahwa: (1) pemerintahnya menerima dan mendukung usul Indonesia untuk membentuk Tata Informasi ASEAN; (2) pembentukan Tata Informasi ASEAN akan memperlancar arus informasi antar negara ASEAN; (3) informasi yang berkembang di kawasan ASEAN masih didominasi oleh informasi dari negara-negara Barat; (4) dominasi informasi dari negara Barat dapat dikurangi sedikit demi sedikit; (5) arus informasi yang dilancarkan ASEAN selain bermanfaat bagi negara-negara anggotanya, juga sangat berguna bagi negara-negara maju yang membutuhkannya (*Merdeka*, 24 Mei 1989).

Pada saat yang sama Menteri Penerangan Singapura, Yeo Ning Hong, mengatakan bahwa: (1) kerjasama informasi intra ASEAN sudah sedemikian baik, sehingga dapat menimbulkan saling pengertian yang mendalam antar sesama anggotanya; (2) usulan pembentukan Tata Informasi ASEAN sangat baik, tetapi masih perlu dibicarakan dalam konferensi; (3) pertemuan Menteri Penerangan ASEAN ke-1 ini akan mempererat kerjasama ASEAN di bidang penerangan (*Merdeka*, 24 Mei 1989).

Presiden Soeharto mengatakan pada pembukaan konperensi itu di Bina Graha bahwa: (1) bagi anggota ASEAN, informasi dan komunikasi bukan hanya merupakan kebutuhan hidup, melainkan juga merupakan salah satu sarana untuk menciptakan rasa kebersamaan regional dan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik; (2) situasi dunia dewasa ini bergerak menuju ke arah zaman baru yang memungkinkan bangsa-bangsa hidup damai, saling mengerti dan kerjasama untuk kesejahteraan umat manusia; (3) ketegangan dan berbagai konflik di berbagai kawasan dunia telah mereda, keadaan semacam ini memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa untuk melakukan pembangunan; (4) masing-masing anggota ASEAN dan bersama-sama harus memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk mempercepat pembangunan; (5) informasi dan komunikasi mempunyai arti yang penting bagi ASEAN; (6) peningkatan persaudaraan, saling percaya dan kerjasama antar anggota ASEAN dapat mencerminkan tekad para anggotanya untuk mengurus dan menentukan masa depannya sendiri; (7) untuk mewujudkan ketetapan hatinya, ASEAN harus terus-menerus berusaha memperkuat rasa kebersamaan regional di berbagai bidang, khususnya dalam bidang komunikasi; (8) negara-negara sedang membangun, termasuk ASEAN masih dibanjiri berita-berita yang di satu pihak menguntungkan kepentingan negara-negara maju dan di lain pihak justru merusak citra negara-negara yang sedang membangun; (9) perjuangan untuk mengubah ketimpangan informasi merupakan bagian yang penting dari perjuangan untuk mewujudkan tata dunia baru di bidang politik dan ekonomi. Perjuangan ASEAN untuk mengubah ketimpangan ini merupakan bagian dari perjuangan untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas dan netral; (10) pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif dan edukatif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat dan memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah pers yang sehat, bebas dan bertanggungjawab; (11) pers yang sehat, bebas dan bertanggungjawab dapat menanggulangi pengaruh buruk akibat ketimpangan informasi (*Suara Pembaruan*, 24 Mei 1989).

Menteri Penerangan RI, Harmoko, mengatakan bahwa: (1) pengalaman berharga satu negara ASEAN akan merupakan nilai pembanding bagi negara anggota ASEAN lainnya. Dengan perbandingan ini, ASEAN secara bersama-sama dapat mengambil manfaat bagi kemajuan pembangunan di tingkat nasional maupun

regional; (2) kerjasama intra ASEAN di berbagai bidang, khususnya di bidang penerangan, dapat menamakan saling pengertian yang kuat di antara negara-negara anggotanya; (3) penyebaran arus informasi melalui media massa di negara-negara ASEAN tidak terlepas dari sistem nilai-nilai sosial budaya maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara anggota; (4) bagi setiap negara anggota ASEAN tidak ada cara lain yang lebih berharga, selain saling menghormati dan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai serta ketentuan yang berlaku di negara masing-masing; (5) untuk menghadapi keanekaragaman sistem di negara-negara anggotanya, ASEAN harus memiliki kesamaan kepentingan untuk menyebarluaskan arus informasi yang benar-benar dapat dilakukan secara bebas dan bertanggungjawab; (6) penyebaran arus informasi yang bebas dan bertanggungjawab dapat memantapkan ketahanan regional kawasan ASEAN; (7) ASEAN agar menciptakan keseimbangan penyebaran arus informasi antara negara maju dan negara berkembang; (8) ASEAN agar lebih mempersatukan pengertian dan memperkuat sikap terhadap kepentingan cita-cita pembentukan Tata Internasional Baru di bidang informasi dan komunikasi; (9) majunya teknologi informasi dan komunikasi pembangunan penerangan ASEAN banyak mengalami kemajuan (*Antara*, 24 Mei 1989).

Menteri Penerangan Malaysia, Dato Mohammad Rahmat, mengatakan bahwa: (1) semua hambatan yang mengganggu pertukaran informasi intra ASEAN perlu dihilangkan; (2) pembatasan-pembatasan arus informasi antar negara, tarif informasi tinggi dan perbedaan sistem birokrasi merupakan penyebab tidak bebas dan lancarnya arus informasi intra ASEAN; (3) pertukaran barang cetakan antar negara ASEAN perlu dibebaskan dari hambatan, misalnya dengan memperbaiki peraturan dan tata hukum yang tidak membedakan antara barang cetakan yang berasal dari dalam dan luar ASEAN; (4) buku-buku tentang pendidikan dan pengetahuan jangan diijinkan memasuki kawasan ASEAN secara bebas; (5) pertukaran kesenian dan kebudayaan ASEAN memerlukan dorongan; (6) pertukaran dan arus informasi yang bebas di ASEAN akan meningkatkan kesadaran rakyat negara-negara anggotanya untuk berpartisipasi memperjuangkan cita-cita ASEAN; (7) persatuan ASEAN sebagai aspirasi bersama sangat tergantung pada kuatnya persatuan rakyat ASEAN; (8) pada kesempatan ini sangat tepat untuk memikirkan bahasa pergaulan ASEAN (*Kompas*, 25 Mei 1989).

Para Menteri Penerangan ASEAN sepakat untuk mempererat kerjasama dan meningkatkan peranan mereka bagi kemajuan dan pengembangan informasi sebagai upaya meningkatkan kerjasama dan solidaritas di segala bidang. Selain itu para menteri juga menyadari kedudukan dan peranan pers yang penting serta strategis dalam proses pembangunan nasional di setiap negara ASEAN. Kesepakatan-kesepakatan lainnya: (1) pers ASEAN agar didasarkan pada asas pers yang bebas dan memiliki tanggung jawab sosial; (2) pers ASEAN agar tetap peka untuk menangani masalah yang dapat mempengaruhi solidaritas bersama; (3) hubungan redaktur dan wartawan agar ditingkatkan untuk mempertinggi kesadaran mengenai pentingnya ASEAN; (4) negara-negara dalam jaringan Pertukaran Berita ASEAN (ANEX atau *ASEAN News Exchange*) agar terus memperkuat sarana ANEX dalam pengumpulan dan penyebaran berita di dalam maupun di luar ASEAN; (5) Singapura dan Brunei Darussalam agar segera mendirikan kantor berita; (6) mereka akan berkonsultasi dengan instansi telekomunikasi di negara masing-masing untuk mengusahakan agar tarif bersama penggunaan jasa komunikasi ANEX menjadi lebih murah; (7) mereka mempertimbangkan untuk mendirikan sebuah pusat pers yang bertugas sebagai bank data tentang ASEAN dan negara-negara anggotanya; (8) mereka bersedia saling tukar-menukar pengalaman agar masing-masing negara dapat mengembangkan hubungan dengan media asing; (9) perlu dicarikan jalan keluar agar pemberitaan media asing mengenai anggota ASEAN lebih seimbang dan obyektif; (10) media asing agar memperhatikan nilai-nilai serta kepekaan bangsa-bangsa ASEAN; (11) pers ASEAN agar turut membantu usaha untuk mencapai tujuan ASEAN, termasuk pemeliharaan kestabilan politik, pertumbuhan ekonomi yang pesat, keadilan sosial, kesatuan regional dan pengembangan sumber daya manusia (*Kompas*, 26 Mei 1989).

Di samping itu, Menteri Penerangan RI, Harmoko, mengatakan pula kepada pers di Gedung Seknas ASEAN Jakarta tanggal 25 Mei 1989 bahwa: (1) pers yang bebas dan memiliki tanggung jawab sosial adalah pers yang memperjuangkan kesejahteraan sosial, mengangkat harkat dan memelihara stabilitas rakyatnya; (2) pers ASEAN yang bebas dan bertanggungjawab bukan berarti mencampuri sistem pers masing-masing negara anggotanya; (3) ASEAN tidak berkonfrontasi, tetapi akan bekerjasama dengan pers asing untuk menciptakan arus informasi yang seimbang dan memiliki kepekaan (*Kompas*, 26 Mei 1989).

2. Lokakarya Penggunaan Sistem Radio Cellular

Lokakarya penggunaan sistem radio cellular ASEAN yang diikuti 20 orang pengelola dan operator telekomunikasi dari ASEAN serta 2 orang ahli dari Selandia Baru dan Hongkong berlangsung di Kuala Lumpur, tanggal 27 Maret 1989 untuk membahas dan menyelidiki penggunaan sistem radio cellular di kawasan ASEAN.

Deputi Menteri Pos, Telekomunikasi dan Energi Malaysia, Ghani Othman, mengatakan pada pembukaan lokakarya itu bahwa: (1) penggunaan sistem radio cellular pada telepon mobil di Malaysia, yang dikenal dengan ATUR (*Automatic Telephone Radio*) bukan langkah baru; (2) pada tingkat ASEAN penggunaan telepon radio otomatis mungkin dapat diterapkan; (3) sekarang saat yang tepat untuk mengadakan kerjasama dalam sistem radio otomatis di ASEAN (*Antara*, 27 Maret 1989).

3. ASEAN Worlddidac Expo ke-2

ASEAN Worlddidac Expo ke-2 yang diikuti oleh 120 peserta dari 25 negara berlangsung di Singapura tanggal 13 Mei 1989 untuk: (1) mempertemukan para konsumen dan produsen alat-alat pendidikan dan latihan khususnya di Asia Tenggara; (2) mencari jawaban mengenai masalah pendidikan di masa depan; (3) membuka peluang dan memperkenalkan produsen di pasaran ekspor (*Pelita*, 15 Maret 1989).

4. Festival Lagu ASEAN

Festival lagu populer ASEAN (*ASEAN Popular Song Festival* atau APSF) ke-6 dan pertemuan tahunan Asosiasi Industri Musik ASEAN (*ASEAN Music Industry Association* atau AMIA) berlangsung di Manila tanggal 14 April 1989 untuk: (1) merangsang lahirnya lagu-lagu asli bermutu dari kawasan ASEAN; (2) menumbuhkan semangat mempromosikan pertukaran budaya antar anggota ASEAN (*Suara Pembaruan*, 7 April 1989).

Pengurus Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), T.J. Sinarjo, mengatakan di Jakarta tanggal 17 April 1989 bahwa: (1) pemusik Indonesia yang dikirim ke festival itu berhasil meraih gelar lagu terbaik dan runner-up, serta penyajian terbaik dan runner-up; (2) kemenangan ini membanggakan karena untuk pertama kali dalam sejarah APSF satu negara memborong semua gelar (*Kompas*, 17 April 1989).

D. KERJASAMA KESEHATAN

1. *Simposium ASI se ASEAN*

Simposium ASI ASEAN yang diikuti oleh wakil-wakil negara anggota ASEAN dan 9 negara non-ASEAN berlangsung di Jakarta tanggal 22 Maret 1989 untuk memperoleh masukan mengenai penggunaan ASI dan upaya penggalakkan penggunaan ASI (*Pelita*, 15 Maret 1989).

2. *Rehabilitasi Pecandu Narkotika*

Kursus latihan Para Perancang Program Rehabilitasi Obat Terlarang ASEAN berlangsung di Malaysia tanggal 17 Maret 1989 untuk membahas usaha mengurangi kambuhnya pecandu narkotika yang sudah mendapatkan perawatan.

Sejken Kementerian Dalam Negeri Malaysia, Wan Sidek Wan Abdul Rahman, mengatakan pada penutupan kursus itu bahwa: (1) negara-negara ASEAN membutuhkan program partisipasi langsung masyarakat untuk mengurangi kambuhnya pecandu narkotika yang sudah dirawat; (2) langkah ini diperlukan karena pembauran ke masyarakat merupakan tahap paling penting dalam proses rehabilitasi ketergantungan pada narkotika; (3) partisipasi langsung masyarakat dapat berupa pelayanan wajib dan sukarela serta partisipasi penuh dari pecandu narkotika yang sudah sembuh; (4) angka bromocorah di antara pecandu narkotika di ASEAN masih tinggi; (5) ASEAN sedang melaksanakan proses pengembangan program rehabilitasi dengan strategi pendekatan ke arah pengurangan jumlah bromocorah, meskipun hasilnya belum memuaskan (*Antara*, 15 Maret 1989).

3. *Sidang ASOD ke-12*

Sidang ASOD (*ASEAN Senior Opium Drug*) ke-12 yang dihadiri 70 orang ahli dari ASEAN berlangsung di Bangkok tanggal 23-29 Mei 1989 untuk: (1) mengkaji kemajuan hasil sidang terakhir ASOD di Singapura; (2) melanjutkan kegiatan mengatasi penyalahgunaan narkotika di negara-negara ASEAN; (3) membahas kebijakan ASEAN untuk mempererat kerjasama mengatasi persoalan narkotika (*Antara*, 30 Mei 1989).

Hasil sidang antara lain: (1) mengundang Birma, Laos dan Hongkong untuk berperan serta dalam sidang ASOD mendatang; (2) pencegahan perkara narkotika dan pengawasan kegiatan di kawasan ASEAN agar di-

tingkatkan dan sumber dana harus dilibatkan; (3) kesinambungan dukungan dana dan teknik oleh mitra dialog ASEAN dan organisasi dunia lainnya kepada kegiatan ASEAN yang berkaitan dengan masalah narkotika diberi penghargaan; (4) menyetujui pendirian dana narkotika ASEAN untuk melatih para petugas anti narkotika.

Pertemuan itu juga memutuskan bahwa: (1) kegiatan ASEAN yang berkaitan dengan narkotika pada masa-masa mendatang agar dirumuskan sesuai dengan pedoman garis besar keterpaduan kegiatan pengawasan penyalahgunaan narkotika di masa mendatang, persetujuan PBB tahun 1988 tentang peredaran gelap narkotika dan obat terlarang serta rencana kerja lima tahun ASEAN; (2) sidang mendatang diselenggarakan di Brunei Darussalam tahun 1990 (*Antara*, 30 Mei 1989).

4. *Kongres Psikiatri dan Kesehatan Jiwa*

Kongres Psikiatri dan Kesehatan Jiwa ASEAN yang dihadiri oleh 300 orang peserta dari ASEAN berlangsung di Singapura tanggal 30 Maret - 2 April 1989 untuk membahas: (1) arti penting psikiatri dan kesehatan jiwa; (2) psikiatri biologik, pandangan baru mengenai pengobatan penyakit skizofrenia, gangguan efektif, neurosa, alkoholisme dan gangguan kepribadian; (3) aspek psikiatri dari penyakit AIDS; (4) undang-undang kesehatan jiwa di negara-negara anggota ASEAN; (5) masa depan psikiatri di ASEAN; (6) berbagai masalah psikiatri dan kesehatan jiwa dalam Angkatan Bersenjata (*Suara Pembaruan*, 1 Mei 1989).

Pejabat Menteri Kesehatan Singapura, Mr. Yeow Cheow Tong, mengatakan pada pembukaan Kongres itu: (1) pembinaan dan pelayanan masyarakat akan dikembangkan, ditingkatkan dan disentralisasi ke pelayanan di poliklinik yang tersebar di Singapura; (2) proyek percontohan terakhir untuk membantu keluarga merawat anggotanya yang menderita gangguan jiwa di rumahnya sendiri sedang dilaksanakan di Singapura; (3) saat ini Singapura mempunyai 47 dokter jiwa dan pada tahun 2000 akan meningkat menjadi 98 orang; (4) penambahan jumlah psikiatri mutlak diperlukan karena jumlah pasien yang datang berkonsultasi dan berobat di klinik psikiatri anak dan remaja terus meningkat (*Suara Pembaruan*, 1 Mei 1989).

Direktur Rumah Sakit Jiwa Woodbridge, Prof. Teo Seng Hock, mengatakan bahwa: (1) tidak ada satu negara di dunia yang berhasil memberikan pelayanan psikiatri di rumah sakit jiwa saja; (2) pelayanan psikiatri

bagi pasien gangguan jiwa oleh masyarakat pasti lebih baik; (3) perawatan di rumah sakit lebih tepat bagi mereka yang gangguan jiwanya sudah kronik; (4) pelayanan psikiatri masyarakat yang komprehensif mutlak diperlukan tidak hanya di Singapura, tetapi di negara-negara anggota ASEAN lainnya (*Suara Pembaruan*, 1 Mei 1989).

5. Pertemuan Konsultasi Kesejahteraan Anak ASEAN

Pertemuan Konsultasi Kesejahteraan Anak ASEAN berlangsung di Jakarta tanggal 15-16 Mei 1989 untuk: (1) mempersiapkan utusan ASEAN ke Sidang Umum PBB bulan September 1989; (2) tukar-pikiran dan pengalaman mengenai berbagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang akan menggantikan generasi tua (*Antara*, 17 Mei 1989).

Ketua Delegasi Indonesia, Dr. Suyono Yahya MPH, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 16 Mei 1989 bahwa: (1) setelah 10 tahun diproses masalah pembinaan kesejahteraan anak-anak di ASEAN mendekati penyelesaian; (2) melalui pertemuan ini, diharapkan kelangsungan hidup anak-anak dapat terwujud dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak dapat dilaksanakan; (3) kepincangan dalam kesejahteraan kehidupan anak-anak disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang cepat, peperangan, musibah alam dan penyebab lainnya yang memaksa mereka terlantar, hidup tidak menentu dan berkeliaran; (4) keadaan ini tetap menjadi perhatian pemerintah dan organisasi-organisasi sosial atau keagamaan di negara-negara anggota ASEAN untuk mengatasinya (*Antara*, 17 Mei 1989).

Pada saat yang sama, Ketua Delegasi Muangthai, Saisuree Chotikul, mengatakan bahwa: (1) kesimpulan yang diperoleh dalam pertemuan itu cukup baik dan dapat disetujui; (2) jauh sebelum lahir Tahun Internasional Anak 1979, negaranya telah ada Undang-Undang yang mengatur masalah kesejahteraan anak dan kewajiban orang tua untuk membina dan menyantuni anak-anak terlantar (*Antara*, 17 Mei 1989).

II. MASALAH KEAMANAN ASEAN

1. SEMINAR KEAMANAN REGIONAL ASEAN

Menlu Malaysia Abu Hassan Omar mengatakan pada seminar Keamanan Regional ASEAN tanggal 4 Mei 1989 bahwa: (1) kekuatan ekonomi Jepang yang belum pernah dialami sebelumnya merupakan ancaman

bagi ASEAN; (2) dalam menghadapi abad ke-21 investasi langsung, pemutaran kembali surplus perdagangan, pasaran barang-barang ASEAN dan program bantuan teknologi serta bantuan pembangunan Jepang sangat menguntungkan ASEAN; (3) yang terpenting bukan keseimbangan ekonomi dan militer yang absolut, tetapi pencegahan ketidakseimbangan yang sangat menyolok; (4) ASEAN harus bekerjasama lebih keras untuk mencapai sasaran-sasaran baru dalam kerjasama ekonomi, politik dan militer (*Suara Karya*, 6 Mei 1989).

2. KERJASAMA MILITER DAN KEAMANAN ASEAN

Konperensi Militer dan Keamanan ASEAN berlangsung di Singapura tanggal 22-25 Maret 1989 dengan tema: "Towards Greater ASEAN Military and Security Cooperation: Problems and Prospects." Pada konperensi ini Dr. J. Soedjati Djiwandono membahas tentang "The Big Powers, ASEAN and Asia Pacific Security: A Jakarta Perspective" (*Nawala CSIS*, Tahun VIII, No. 5, Maret 1989).

III. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA-MITRANYA

A. HUBUNGAN ASEAN-UNDP

Siaran pers Perwakilan UNDP Jakarta tanggal 3 Februari 1989 menyebutkan bahwa: (1) Sekjen ASEAN, Roderick Yong, dan Kepala Perwakilan UNDP Jakarta, Galal M. Magdi, telah menandatangani naskah kerjasama perikanan; (2) kerjasama ini akan mendidik tenaga-tenaga pelatih tingkat regional dalam bidang aplikasi teknik manajemen, monitoring, kontrol dan supervisi; (3) proyek yang dilaksanakan organisasi pangan dunia (FAO) akan berlangsung selama 18 bulan dengan bantuan sebesar US\$400.000 (*Antara*, 3 Februari 1989).

B. HUBUNGAN ASEAN-MEE

Ketua Perwakilan ASEAN ke persidangan MEE, Dr. Abdul Hadi Derani, mengatakan di Brussel tanggal 16 Maret 1989 bahwa: (1) ASEAN perlu membuat persiapan awal dan mengadakan pembicaraan dengan investor asing sehubungan dengan pembentukan pasaran tunggal MEE; (2) ASEAN mempunyai waktu dua tahun untuk menyusun strategi sebagai tindak balas terhadap pembentukan pasaran tunggal MEE; (3) pembentukan

pasaran tunggal MEE memberikan pengaruh buruk terhadap perjanjian perdagangan antara negara berkembang dan anggota MEE; (4) meskipun pembentukan pasaran tunggal MEE itu untuk menghadapi ekonomi Amerika Serikat, akan tetapi negara berkembang dapat terkena akibat yang cukup berat; (5) peraturan pasaran tunggal MEE mewajibkan produk-produk yang diekspor ke negara-negara MEE, 80% bahan mentahnya harus diproses di negara anggota MEE. Hal ini akan menghambat pertumbuhan industri, khususnya industri elektronika negara berkembang; (6) pasaran tunggal akan menghambat masuknya investor asing di negara berkembang, karena mereka khawatir mengalami kesulitan untuk memasarkan barangnya ke negara-negara Eropa; (7) ASEAN telah meminta MEE untuk memberikan laporan lengkap dan meminta jaminan bahwa pasaran tunggal MEE tidak merusak perjanjian dagang dua arah; (8) ASEAN merasa khawatir karena parlemen Eropa mendukung gagasan MEE untuk memperketat syarat pemberian bantuan dari negara-negara MEE (*Antara*, 20 Maret 1989).

C. HUBUNGAN ASEAN-AMERIKA SERIKAT

1. Masalah Kawasan Bebas Senjata Nuklir

Ketua Komis I DPR-RI, Imron Rosyadi SH, mengatakan di Jakarta tanggal 3 April 1989 bahwa: (1) sikap Amerika yang tidak mendukung perjuangan ASEAN untuk membuat kawasan Asia Tenggara bebas senjata nuklir sangat disesalkan dan dukungan Uni Soviet terhadap gagasan ini patut dipuji; (2) penyebaran nuklir dan pangkalan militer asing mengganggu dan mengancam usaha-usaha untuk mewujudkan perdamaian dunia; (3) tidak benar dan tidak wajar jika negara adikuasa hanya memperjuangkan dan menginginkan konsep bebas senjata nuklir di sebagian wilayah Eropa saja (*Angkatan Bersenjata*, 4 April 1989).

2. Laporan Komite Pengarah Hubungan ASEAN-Amerika Serikat

Hasil laporan Komite Pengarah Hubungan ASEAN-AS yang beranggotakan 25 peneliti dari ASEAN dan Amerika Serikat yang disiarkan oleh pemerintah Singapura tanggal 9 Februari menyebutkan bahwa: (1) rancangan hubungan ekonomi yang lebih erat antara ASEAN dan AS akan diajukan kepada pemerintah Bush pada bulan April 1989; (2) suatu kerangka persetujuan ekonomi kedua pihak akan diadakan, sehingga

memberikan peluang bagi setiap anggota ASEAN untuk menandatangani suatu persetujuan perdagangan bebas bilateral (FTA atau *Free Trade Agreement*) dengan AS; (3) kerjasama dua arah dalam perdagangan, investasi dan teknologi perlu diperkuat (*Antara*, 10 Februari 1989).

3. Seminar ASEAN - Amerika Serikat

Seminar ASEAN-AS yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian East-West Center Hawaii dan Institut of South-East Asia Studies Singapore berlangsung di Washington tanggal 13 April 1989 untuk merundingkan kerangka kerja yang merupakan payung kerjasama ekonomi menuju zona perdagangan bebas antara ASEAN dan AS (*Suara Karya*, 15 April 1989).

Dr. Michel Plumer dari East-West Center mengatakan dalam seminar itu bahwa: (1) kesadaran untuk mengurangi berbagai hambatan perdagangan, kini mulai dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN; (2) selama ini investasi AS di ASEAN didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar perminyakan dan elektronika; (3) sekarang ASEAN perlu membuka diri untuk investasi perusahaan-perusahaan yang lebih kecil (*Suara Karya*, 15 April 1989).

Sementara itu, Wakil Presiden East-West Center bidang perencanaan, Dr. Seiji Naya mengatakan bahwa hasil dan usul-usul dalam seminar ini akan dibahas oleh pemerintah AS dan ASEAN dalam dialog mereka bulan Oktober 1989 (*Suara Karya*, 15 April 1989).

Seminar menyarankan agar: (1) salah satu isi persetujuan kerjasama ekonomi itu merupakan komitmen bersama untuk meliberalkan perdagangan dan investasi; (2) komite Trans-Pasifik yang anggotanya terdiri dari Menteri Perdagangan AS dan ASEAN dengan penasihat para ahli dan wakil dari pihak swasta dibentuk. Komite itu akan bertemu setahun sekali untuk menangani perselisihan perdagangan dan investasi serta melakukan perundingan untuk mencapai persetujuan lebih jauh mengenai subsidi, penghapusan pajak berganda dan berbagai hambatan perdagangan, hak cipta, investasi dan jasa; (3) persetujuan perdagangan AS dan ASEAN menjadi tujuan akhir dari kerangka persetujuan; (4) persetujuan itu diharapkan menjadi dasar persetujuan-persetujuan selanjutnya di wilayah Asia Pasifik; (5) semua persetujuan berdasarkan pada peraturan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) (*Suara Karya*, 15 April 1989).

D. HUBUNGAN ASEAN-JEPANG

1. Dana Pinjaman Jepang

Pimpinan Bank Pembangunan Malaysia, Nik Ibrahim, mengatakan kepada pers di Kuala Lumpur tanggal 31 Januari 1989 bahwa: (1) para pengusaha Malaysia menyambut baik adanya dana pinjaman pembangunan Jepang-ASEAN; (2) dana ini merupakan proyek gabungan kerjasama ekonomi antara pemerintah Jepang dan negara-negara anggota ASEAN; (3) Malaysia merupakan negara ASEAN pertama yang mendapat persetujuan untuk meminjam dana itu (*Antara*, 1 Februari 1989).

2. Sikap Pemerintah Jepang Terhadap ASEAN

PM Jepang Noburo Takeshita, mengatakan di sidang DPR Jepang (*Diet*) tanggal 10 Februari 1989 bahwa Jepang akan berusaha mempererat hubungan dengan ASEAN dan negara-negara Pasifik serta negara-negara tetangga lainnya (*Suara Pembaruan*, 11 Februari 1989).

Pada saat yang sama Menteri Luar Negeri Jepang, Susuke Uno, mengatakan: (1) ASEAN merupakan kunci stabilitas Asia Tenggara dan Jepang berusaha meningkatkan hubungan kerjasama di berbagai bidang dengan ASEAN; (2) penyelesaian masalah Kamboja tidak dapat dipisahkan dari usaha mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara; (3) Jepang ingin membantu mewujudkan stabilitas dan pembangunan di kawasan Asia Pasifik; (4) penarikan seluruh pasukan Vietnam dari Kamboja dan pencegahan kebijaksanaan brutal yang dijalankan rezim Pol Pot sangat penting untuk membantu memecahkan masalah Kamboja; (5) Jepang akan terus membantu usaha ASEAN untuk membantu terlaksananya penentuan nasional rakyat Kamboja dan pembentukan negara Kamboja yang merdeka, bebas dan netral (*Antara*, 11 Februari 1989).

3. Sistem Perdagangan Terbuka Jepang

Duta Besar Jepang untuk Malaysia, Noburu Nakahira, mengatakan kepada Klub Pemilik Bank di Malaysia tanggal 16 Mei 1989 bahwa: (1) ASEAN agar meningkatkan usaha untuk menggunakan peluang yang muncul dari sistem perdagangan Jepang yang terbuka; (2) jika ASEAN tidak menggunakan sepenuhnya peluang itu, sistem perdagangan terbuka Jepang tidak

akan banyak memberikan keuntungan; (3) langkah Jepang itu dilakukan untuk meningkatkan kesempatan kepada ASEAN untuk memasuki pasaran Jepang; (4) ASEAN perlu mengkaji kembali sistem perdagangan bilateralnya dengan Jepang agar peningkatan hubungan perdagangan antara kedua negara dapat diwujudkan; (5) untuk masa-masa mendatang ASEAN diperbolehkan menjual lebih banyak produknya ke Jepang (*Antara*, 18 Mei 1989).

4. Konperensi ASEAN-Jepang ke-2

Konperensi ASEAN-Jepang ke-2 yang diselenggarakan oleh CSIS bekerjasama dengan The Japan Institute of International Affairs (JIJA) dan ASEAN-ISIS, dihadiri oleh 40 peserta, di antaranya 14 orang wakil Jepang dan Dubes Jepang untuk Indonesia, Sumeo Edamura, berlangsung di Bali tanggal 20-21 Maret 1989. Konperensi ini membahas perkembangan ekonomi, politik dan keamanan di wilayah Asia Pasifik, yang dibagi menjadi 4 bagian yakni: (1) *International Situation in Asia and Pacific*; (2) *Situation in Southeast Asia*; (3) *Japan's Security Policy*; dan (4) *Internationalization of Japan*.

Makalah-makalah yang dibahas dalam konperensi ini adalah:

1. *Sino-Soviet Rapprochement -- Its Impacts on East and Southeast Asia*: Tatsumi Okabe.
2. *The USSR's "New Thinking" in the Asia-Pacific Region -- Focus on the Sino-Soviet Detente*: Bilveer Singh.
3. *A Decade War in Cambodia -- Regional Initiative under International Pressure*: Yoneji Kuroyanagi.
4. *The Philippines -- Problems and Prospects*: Cayetano Paderanga.
5. *Japan's Security Policy and Implications on the ASEAN Nations*: Seizaburo Sato.
6. *Japan's Security -- An ASEAN Perspective*: Jusuf Wanandi.
7. *Japan's International Role*: Tadashi Ideka.
8. *Internationalization of Japan -- Cultural Aspects*: Chatthip Nartsupha.

Menhankam L.B. Moerdani mengatakan pada pembukaan konperensi itu bahwa: (1) munculnya Jepang sebagai negara adidaya ekonomi tidak disangsikan lagi menjadi asset atau modal memperkuat perekonomian negara-negara ASEAN; (2) peningkatan anggaran pertahanan Jepang menjadi pusat perhatian negara-negara

berkembang. Tetapi persoalannya sekarang adalah kemungkinan Jepang untuk menyebarkan satuan keamanannya ke arah selatan; (3) peningkatan keamanan Jepang memang tidak sekaligus berarti kehadiran militernya langsung, tetapi yang penting adalah menjaga dan memelihara kerjasama antar semua pihak, termasuk ASEAN (*Antara*, 21 Maret 1989); (4) melalui persahabatan dan saling menghormati, Jepang dapat melanjutkan bantuan pembangunan ekonomi kepada Indonesia dengan investasi langsung ke daerah-daerah di luar Jawa; (5) ASEAN dan Jepang saat ini ditantang, baik secara individu maupun kolektif, untuk menjawab cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai wilayah dunia, terutama di Pasifik; (6) ASEAN dan Jepang harus dapat bekerjasama membangun lingkungan dunia yang terbuka, stabil dan damai atas dasar saling menghormati serta mewujudkan saling ketergantungan yang lebih berimbang; (7) saling ketergantungan yang lebih berimbang tercermin pada distribusi keuntungan yang lebih adil dari pemanfaatan semua jenis sumber daya yang terbatas; (8) laju pertumbuhan ekspor yang tinggi dan masuknya modal Jepang ke negara-negara ASEAN merupakan keuntungan ASEAN; (9) ASEAN sudah dikenal sebagai satu kesatuan yang dapat memainkan peranan yang konstruktif dalam berbagai perundingan internasional; (10) Jepang dan ASEAN dapat bersama-sama atau saling mendukung posisi masing-masing di forum internasional (*Kompas*, 22 Maret 1989).

Prof. Seizaburo Sato, dari Universitas Tokyo, mengatakan kepada pers di Bali tanggal 21 Maret 1989 bahwa: (1) Jepang tidak akan mengubah kebijaksanaan pertahanannya yang berlaku sekarang, selama stabilitas lingkungannya tidak berubah; (2) sistem keamanan semesta (*comprehensive security*) Jepang sama dengan konsep ketahanan nasional Indonesia; (3) tentara beladiri Jepang tidak memiliki peralatan militer jarak jauh; (4) semua kapasitas perang Jepang hanya untuk menghalangi kemungkinan serangan ke negaranya; (5) kebijaksanaan pertahanan Jepang punya kaitan dengan tingkah laku Uni Soviet dan AS; (6) AS dan Uni Soviet tidak dapat mempertahankan seluruh kepentingannya secara militer, apalagi Jepang yang pernah mengalami trauma dalam hal itu (*Kompas*, 22 Maret 1989).

Direktur Pusat Pengkajian Masalah Internasional (CSIS), Jusuf Wanandi mengatakan kepada pers di Bali tanggal 20 Maret 1989 bahwa: (1) Jepang akan memegang peranan penting di kawasan Asia Pasifik; (2) ASEAN tidak perlu khawatir pada penambahan anggaran pertahanan Jepang yang digunakan untuk mem-

pertahankan dan memelihara keamanan lautnya dari serangan kapal selam musuh; (3) Jepang harus menanggung beban keamanan AS dan ikut menjaga kestabilan keamanan di Asia Pasifik; (4) Jepang kini semakin diperhitungkan, tidak hanya dari segi ekonomi tetapi di masa mendatang peran politiknya semakin nyata dalam hubungan internasional; (5) berbagai kebijakan ekonomi Jepang sudah berusaha membantu pemasaran produk-produk negara-negara ASEAN dengan perlakuan istimewa atau proteksi tradisional; (6) penting bagi ASEAN untuk belajar teknologi dan mempelajari budaya konsumen serta selera masyarakat Jepang agar dapat menerobos pasaran negara itu (*Merdeka*, 23 Maret 1989).

5. Kunjungan PM Noboru Takeshita ke ASEAN

Laporan Harian Yomiuri Shimbun Tokyo tanggal 7 April 1989 mengatakan bahwa: (1) PM Jepang Noboru Takeshita akan mengumumkan Doktrin Takeshita untuk memperkokoh solidaritas dengan ASEAN; (2) Doktrin ini akan disampaikan dalam pidatonya di Jakarta tanggal 5 Mei 1989, dalam rangkaian kunjungan muhibahnya ke negara-negara ASEAN tanggal 29 April - 7 Mei 1989; (3) Takeshita menyambut baik penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja dan menjanjikan bantuan untuk mempercepat pulihnya suasana damai di kawasan; (4) Jepang akan menawarkan kerjasama penuh untuk membantu pembangunan Kamboja; (5) Takeshita akan menegaskan sikap Jepang dan ASEAN untuk terus bahu-membahu membantu perbaikan ekonomi maupun mengusahakan perdamaian dunia; (6) Jepang akan mengutarakan kesanggupannya untuk meningkatkan bantuan pinjaman Yen kepada ASEAN serta melonggarkan persyaratan untuk membantu pembangunan ekonomi negara-negara ASEAN; (7) Jepang akan menjelaskan upaya-upayanya untuk mengisi tiga prinsip kebijaksanaannya menyangkut kerjasama internasional, membantu perdamaian, ekonomi serta tukar-menukar kebudayaan; (8) Jepang menginginkan perluasan dan peningkatan hubungan Jepang dengan ASEAN secara keseluruhan (*Antara*, 7 April 1989).

Kepala Konsuler Kedutaan Jepang di Kuala Lumpur, Wataru Nishigahira, mengatakan kepada wartawan di Kuala Lumpur tanggal 26 April 1989 bahwa: (1) PM Takeshita akan meletakkan jabatannya setelah Parlemen Jepang (*Diet*) menyetujui anggaran belanja negara tahun 1989; (2) Takeshita telah memutuskan untuk meneruskan rencana kunjungan ke negara-negara ASEAN; (3) masalah hutang ASEAN sehubungan de-

ngan kenaikan nilai Yen, Kamboja dan peluang barang-barang produksi ASEAN masuk ke pasaran Jepang akan merupakan topik pembicaraan kunjungan Takeshita itu (*Antara*, 26 April 1989).

Anggota Komisi I DPR-RI, Marzuki Darusman mengatakan kepada pers di Jakarta bahwa: (1) kunjungan PM Jepang Takeshita harus disambut baik, meskipun ia sudah menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya; (2) kunjungan itu menguntungkan karena berarti hubungan baik kedua negara selama ini tidak terputus akibat gejolak intern di Jepang; (3) kunjungan itu bermakna untuk mengikat Jepang agar memperbesar peranannya di Asia Tenggara sesudah kepemimpinan Takeshita; (4) Indonesia perlu memanfaatkan kunjungan itu untuk merundingkan kerjasama yang saling menguntungkan kedua negara; (5) bantuan Jepang untuk pembangunan perekonomian Indonesia, khususnya bantuan yang bersifat mengikat, perlu dibahas dengan Takeshita; (6) doktrin Takeshita jangan sampai dipersiapkan untuk meresmikan suatu hubungan ketergantungan kepada Jepang (*Angkatan Bersenjata*, 27 April 1989).

Menteri Sekretaris Negara Moerdiono mengatakan kepada pers di Bina Graha tanggal 26 April 1989 bahwa: (1) Presiden Soeharto tetap akan memberikan penghormatan sepenuhnya kepada PM Takeshita yang akan berkunjung di Indonesia tanggal 4-6 Mei 1989; (2) Takeshita tetap sebagai PM dan mewakili pemerintah dan rakyat Jepang (*Kompas*, 28 April 1989).

Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 27 April 1989 bahwa: (1) rencana kunjungan PM Jepang Noboru Takeshita ke ASEAN tetap penting; (2) krisis politik yang melanda pemerintahan Takeshita tidak akan mengubah kebijakan negara itu terhadap Asia Tenggara; (3) pergantian pimpinan di Jepang hanya berlangsung di dalam LDP, bukan pergantian pimpinan dari partai yang berkuasa ke partai oposisi (*Kompas*, 28 April 1989).

Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Sumio Edamura, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 1 Mei 1989 bahwa: (1) PM Takeshita akan mengadakan pembicaraan secara terbuka dengan para pemimpin ASEAN mengenai penyelesaian politik di Kamboja; (2) PM Takeshita akan membicarakan masalah kelanjutan pembangunan dan pengembangan seluruh kawasan Indocina sebelum pertemuan puncak Cina-Soviet medio Mei dan Konperensi Post-Ministerial ASEAN bulan Juni

1989; (3) pembicaraan masalah Kamboja sangat penting karena merupakan kunci untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas kawasan; (4) pertemuan JIM-II di Jakarta bulan Februari 1989 merupakan contoh prakarsa yang baik dari ASEAN; (5) langkah ini selaras dengan Prakarsa Kerjasama Internasional Takeshita bulan November 1987 yang meliputi tiga pilar yakni: (a) penguatan kerjasama mencapai perdamaian; (b) penguatan pertukaran kebudayaan internasional; (c) peningkatan Bantuan Pembangunan Resmi Jepang (ODA); (6) ASEAN merupakan penerima terpenting prakarsa itu, sehingga PM Takeshita berusaha meningkatkan hubungan pemerintahannya dengan ASEAN; (7) Jepang memandang kawasan Asia Pasifik sebagai satu di antara wilayah yang paling dinamis dan berkembang di dunia. Kawasan ini akan memainkan peranan utama untuk memajukan dunia; (8) kunjungan Takeshita kali ini sangat berarti, karena akan mendapat kesempatan mengadakan tukar pandangan secara terbuka dengan para pemimpin ASEAN mengenai kerjasama yang dimungkinkan di kawasan Asia Pasifik pada abad 21; (9) kunjungan PM Jepang ke ASEAN merupakan suatu tradisi untuk meningkatkan kesinambungan, kemandirian dan kehandalan hubungan Jepang-ASEAN (*antara*, 1 Mei 1989).

Dalam pidatonya yang berjudul "Jepang dan ASEAN Bersama dan Maju Bersama," di Hotel Borobudur tanggal 5 Mei 1989, PM Takeshita menegaskan: (1) tentang prinsip yang menjadi pilar Prakarsa Kerjasama Internasional (*International Cooperation Initiative - ICI*) adalah: (a) memperkokoh kerjasama untuk membina perdamaian; (b) memperluas bantuan resmi pembangunan (*Official Development Assistance - ODA*); (c) meningkatkan pertukaran kebudayaan internasional, sehingga rakyat yang berbeda-beda dapat saling menghormati dan mengerti sebagai sesama manusia; (2) ASEAN merupakan salah satu kawasan terpenting dan oleh karena itu Jepang akan meningkatkan prakarsanya di kawasan ini; (3) berdasarkan konstitusinya, Jepang tidak ingin menjadi negara militer; (4) Jepang mengerahkan kemampuan semaksimalnya untuk secara aktif bekerjasama mencapai perdamaian; (5) Jepang akan melakukan usaha-usaha diplomasi secara aktif untuk mengupayakan penyelesaian sengketa dengan mengirimkan para ahli dan personil ke tempat timbulnya kesulitan serta memberikan bantuan keuangan bagi pemeliharaan perdamaian; (6) Jepang bertekad untuk menyempurnakan volume dan kualitas ODA demi tercapainya perdamaian dan kemakmuran dunia; (7) Jepang menganggap ASEAN sebagai salah satu mitra pa-

ling penting dalam kerjasama ekonomi; (8) Jepang telah mengalokasikan 50% dari jumlah total ODA untuk ASEAN; (9) Jepang menjadi negara donor ODA terbesar bagi negara-negara ASEAN; (10) Jepang akan terus menekankan hubungan dengan ASEAN karena hal itu sudah menjadi kebijakan; (11) penyelesaian politik yang adil di Kamboja memerlukan jaminan bagi penarikan mundur pasukan Vietnam di bawah pengawasan internasional serta mencegah terulangnya kembali politik rezim Pol Pot; (12) pemilihan umum yang bebas dan adil di Kamboja diperlukan agar rakyat dapat menentukan nasibnya sendiri; (13) mekanisme pengawasan yang tepat guna dan segala upaya penyelesaian politik harus menjamin tercapainya stabilitas dalam negeri Kamboja (*Pelita*, 6 Mei 1989).

6. Jepang dan Asia Mencari Peran Baru

Seminar yang diselenggarakan Pusat Sumber Informasi Singapura, yang dihadiri oleh 100 orang dari kalangan diplomat, cendekiawan dan usahawan ASEAN, berlangsung di Singapura tanggal 10 Juni 1989 untuk membahas masalah "Jepang dan Asia Mencari Peran Baru."

Mantan Menlu RI, Mochtar Kusumaatmadja, mengatakan pada seminar itu bahwa: (1) negara-negara Asia Tenggara harus dapat meyakinkan Jepang dan AS bahwa Jepang tidak boleh mempunyai kebijaksanaan pertahanan yang terpisah; (2) Jepang tidak boleh diberi peran sebagai polisi di Asia Timur dan Asia Tenggara; (3) pengakuan atas kebutuhan pertahanan negara-negara Asia Tenggara termasuk hak mereka untuk menentukan kebutuhan bagi kepentingan kawasan sangat penting; (4) setiap usaha dan rencana untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Jepang sebagai bagian dari konsep strategi atau pertahanan harus mempertimbangkan masalah itu; (5) sepanjang masyarakat Asia Tenggara dapat mengambil manfaatnya, maka peningkatan pertahanan Jepang tidak harus dilihat sebagai suatu hal yang negatif; (6) selain AS dan Uni Soviet, ancaman terhadap keamanan di kawasan Asia Pasifik dapat datang dari negara lainnya; (7) karena kemajuannya di bidang keuangan dan perekonomian, Jepang menjadi mitra penting ASEAN; (8) ASEAN harus membujuk Jepang untuk memanfaatkan uangnya di Asia Tenggara; (9) usaha-usaha ASEAN dan Jepang di bidang sosial dan budaya masih terlalu kecil (*The Jakarta Post*, 12 Juni 1989).

7. Kerjasama Lingkungan ASEAN-Jepang

Simposium Lingkungan ASEAN-Jepang dihadiri oleh Menteri Lingkungan dari Cina, Singapura, Malaysia, Muangthai, Filipina, Indonesia dan Jepang (sebagai tuan rumah) berlangsung di Tokyo tanggal 7 Juni 1989 untuk mengadakan konsultasi dan koordinasi mengenai lingkungan (*Antara*, 8 Juni 1989).

Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) Indonesia, Prof. Emil Salim, mengatakan pada simposium itu bahwa: (1) Indonesia mengusulkan pembentukan mekanisme gabungan Jepang-ASEAN untuk konsultasi dan koordinasi kerjasama lingkungan; (2) konsultasi berkala dan pelaksanaan proyek-proyek kerjasama dapat dimanfaatkan untuk menganalisa kebutuhan kawasan saat ini dan di masa mendatang untuk melindungi kualitas lingkungan, sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan; (3) konsultasi seperti ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui bantuan yang diperlukan ASEAN; (4) konsultasi berkala Jepang-ASEAN agar dilembagakan pada tingkat pejabat senior seperti kelompok Ahli ASEAN (AEGE) dengan badan Lingkungan Hidup Jepang (JEA); (5) konsultasi ini dapat diperluas menjadi kerjasama kawasan sehingga dapat memperkokoh landasan terciptanya kerjasama global; (6) Indonesia mengharapkan kerjasama ini terus meningkat di masa mendatang; (7) semua upaya lingkungan di masing-masing negara ASEAN tetap bertumpu pada kepentingan lingkungan ASEAN; (8) Indonesia akan terus berusaha memperkokoh kelembagaan pengelolaan lingkungan untuk mengantisipasi masalah lingkungan; (9) di Indonesia terdapat sekitar 20 juta ha lahan kritis, dan pemerintah merencanakan penghutanan kembali 300.000 ha/tahun dengan biaya US\$300 juta; (10) rehabilitasi lahan kritis ini memberikan waktu 65 tahun. Oleh karena itu Indonesia mengundang partisipasi masyarakat internasional untuk membantu proyek ini agar dapat diperpendek waktunya; (11) pencemaran laut dan hutan tropis merupakan masalah yang dihadapi ASEAN saat ini; (12) Jepang yang mempunyai kepentingan di perairan ASEAN agar turut berpartisipasi mengatasi masalah itu (*Antara*, 8 Juni 1989).

Hasil simposium antara lain: (1) mengakui eratnya ketergantungan antara lingkungan global, kegiatan manusia dan kemiskinan; (2) menghimbau semua pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan global; (3) sepakat untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan dengan mengerahkan semua kebijaksanaan dan ke-

mampuan melalui kerjasama global dan regional; (4) sepakat agar kerjasama regional, termasuk pertukaran informasi lingkungan, semakin ditingkatkan; (5) sepakat agar kerjasama gabungan antar negara Asia, khususnya di sektor meteorologi dan kondisi lingkungan, semakin ditingkatkan; (6) perlu kerjasama dengan negara-negara industri, termasuk Jepang, untuk mengatasi masalah lingkungan, karena negara-negara Asia pada umumnya miskin dan lemah teknologinya (*Antara*, 8 Juni 1989).

PM Jepang, Susuke Uno, mengatakan pada penutupan *simposium* itu bahwa: (1) permasalahan dan usulan *simposium* akan disampaikan pada KTT negara industri di Paris bulan Juni 1989; (2) Jepang akan hadir pada KTT itu sebagai wakil Asia; (3) Jepang akan menyelenggarakan pertemuan seperti ini pada bulan September 1989 (*Antara*, 8 Juni 1989).

IV. USAHA ASEAN MEMBANTU MENYELESAIKAN KONFLIK KAMBOJA

A. PERTEMUAN HUN SEN - SIHANOUK DI JAKARTA

Tanggal 26 Maret 1989, Pangeran Norodom Sihanouk menerima pesan dari PM Hun Sen untuk mengadakan KTT di Jakarta tanggal 2-3 Mei 1989.

Dari Bangkok tanggal 8 April 1989 diberitakan bahwa KTT antara PRK dan CGDK batal dilangsungkan di Jakarta, dan akan dipindahkan ke Paris (*Kompas*, 9 April 1989). Akan tetapi berita ini segera disangkal oleh Pangeran Norodom Sihanouk dan Perancis. KTT itu pasti akan diadakan di Jakarta (*Suara Karya*, 10 April 1989).

Pada tanggal 9 April 1989, Pangeran Norodom Sihanouk mengatakan bahwa: (1) Hun Sen telah siap dengan konsesinya yang bersedia menghapuskan kata "Republik Rakyat" untuk nama Kamboja. Tetapi yang menjadi masalah sekarang adalah apakah Kamboja akan tetap menjadi sebuah negara komunis; (2) dia menginginkan agar PRK yang komunis dihapuskan dari Kamboja agar rakyat Kamboja dapat melaksanakan pemilihan umum yang diawasi secara internasional (*Antara*, 10 April 1989).

Pada tanggal 13 April 1989 Pangeran itu juga mengatakan bahwa dalam pertemuannya nanti dengan Hun Sen dia tidak akan membuat sebuah keputusan

pun. Pertemuan itu hanya untuk mendengar dan membicarakan beberapa hal yang menyangkut masalah Kamboja serta untuk mengetahui konsesi-konsesi yang akan diajukan oleh Vietnam dan Hun Sen (*Antara*, 15 April 1989).

Mengenai peranan Indonesia dalam pertemuan di Jakarta ini, Menlu Ali Alatas mengatakan kepada para wartawan di Jakarta tanggal 27 April 1989 bahwa pertemuan ini bukan kelanjutan dari JIM, oleh sebab itu Indonesia tidak banyak berperanan, hanya menyediakan tempat (*Suara Karya*, 28 April 1989).

Sesuai dengan rencana, pembicaraan terpisah antara PM Hun Sen dan Pangeran Norodom Sihanouk, serta antara PM Hun Sen dan PM CGDK, Son Sann, berlangsung di Jakarta tanggal 2-3 Mei 1989. Mereka membicarakan masalah-masalah yang dapat menjembatani tercapainya penyelesaian damai di Kamboja.

Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta tanggal 30 April 1989, Pangeran Norodom Sihanouk mengatakan bahwa dia akan berusaha bersikap lunak dan realistis dalam pertemuannya dengan Hun Sen, antara lain dengan: (1) tidak lagi menuntut penghapusan PRK; (2) tidak lagi menuntut peranan pemeliharaan perdamaian PBB (*International Peace Keeping Force* atau IPKF) untuk mengawasi penarikan mundur pasukan Vietnam, dan sebagai gantinya mengusulkan Komisi Pengawasan Internasional (ICC) atau Mekanisme Pengawasan Internasional (ICM). Namun demikian Pangeran itu juga mengatakan bahwa para anggota ICM itu harus ditentukan melalui suatu Konferensi Internasional yang akan diadakan di Paris di bawah pimpinan Presiden Francois Mitterand, dan tidak ditentukan asal saja seperti yang diinginkan oleh rezim Phnom Penh dan Hanoi (*Kompas*, 1 Mei 1989); (3) Indonesia akan menjadi peserta utama Konferensi Paris itu (*Antara*, 3 Mei 1989).

Selama berada di Jakarta, Pangeran itu juga mengadakan pertemuan terpisah dengan Presiden Soeharto, Wakil Presiden AS, Dan Quayle, dan Menteri Negara Urusan Luar Negeri India, Natwar Singh.

Setibanya di Lanuma Halim Perdanakusuma tanggal 1 Mei 1989, PM Hun Sen mengatakan bahwa berbagai perubahan mendasar telah dilakukan pemerintahnya demi tercapainya perdamaian di Kamboja. Perubahan-perubahan itu antara lain: (1) banyak pasal UUD-nya yang telah diubah; (2) hukuman mati bagi pelaku tindak kriminalitas dihapus; (3) nama Pemerintah Republik Rakyat Kamboja diubah menjadi Peme-

rintang Kamboja; (4) bendera nasional telah diubah pula, warna dasar merah diganti merah biru, meskipun gambar pagoda dengan lima stupa tetap (*Antara*, 2 Mei 1989). Sementara itu, Hun Sen tetap berpendirian bahwa pihaknya bersedia mengadakan kompromi asal tidak untuk Pol Pot, karena kompromi dengan Pol Pot hanya akan merugikan rakyat Kamboja (*Kompas*, 2 Mei 1989).

Seusai mengadakan perundingan tanggal 2 Mei 1989, PM Hun Sen mengatakan kepada para wartawan bahwa pertemuannya dengan pemimpin CGDK telah mencapai kemajuan yang berarti. Ini terbukti dengan: (1) tercapainya kesepakatan mengenai pembentukan Mekanisme Pengawas Internasional (*International Control Mechanism* atau ICM) untuk menggantikan IPKF, meskipun komposisinya masih akan ditentukan dalam konperensi internasional yang telah disepakati akan dilangsungkan di Jakarta dan Paris; (2) penghentian semua bantuan asing kepada faksi-faksi Kamboja yang bertikai setelah ditariknya pasukan Vietnam dari Kamboja; (3) Pangeran Norodom Sihanouk menyetujui perubahan nama Republik Rakyat Kamboja menjadi Negara Kamboja, agama Budha menjadi agama negara, penghapusan hukuman mati dan perubahan warna bendera sebagaimana diusulkan olehnya (*Suara Karya*, 3 Mei 1989). Namun beberapa hal seperti lagu kebangsaan dan peranan partai-partai dalam kehidupan bernegara masih perlu dibicarakan lebih lanjut.

PM Hun Sen juga mengatakan bahwa: (1) dalam pembicaraannya dengan Pangeran Norodom Sihanouk itu dia meminta Pangeran tersebut untuk segera kembali ke Kamboja setelah pasukan Vietnam ditarik mundur, untuk menjadi Kepala Negara Kamboja; (2) di Kamboja perlu dibentuk Dewan Nasional Tertinggi (*Supreme National Council* atau SNC) atau Dewan Nasional Agung (DNA) yang terdiri atas para pemimpin Kamboja di bawah pimpinan Pangeran Norodom Sihanouk. Pemimpin SNC akan didampingi oleh tiga wakil dari tiga faksi lainnya (pembentukan SNC ini ditolak Pangeran Norodom Sihanouk). SNC dapat berada di Phnom Penh maupun di luar negeri (*Angkatan Bersenjata*, 5 Mei 1989); (3) SNC bertugas mengawasi pelaksanaan persetujuan yang telah dicapai oleh faksi, membuat peraturan dan mengawasi pelaksanaan pemilihan umum, serta menyiapkan rancangan konstitusi untuk disampaikan kepada Majelis Nasional; (4) untuk menjalankan tugas itu, NSC dibantu oleh ICM (*Suara Karya*, 3 Mei 1989); (5) Pangeran Norodom Sihanouk tampaknya tidak begitu tertarik dengan rencana pembentukan SNC, sebaliknya banyak tertarik pada serang-

kaian perubahan pasal-pasal Konstitusi Kamboja dan mengajukan beberapa usul, seperti dihapuskannya sistem satu partai dan sebaliknya mengusulkan sistem multipartai yang dikukuhkan dalam konstitusi melalui amandemen; (6) pada prinsipnya Pangeran itu bersedia kembali ke Kamboja asalkan usulnya, terutama mengenai amandemen konstitusi, dilaksanakan dan semua tentara Vietnam telah ditarik dari Kamboja (*Kompas*, 3 Mei 1989). Namun Pangeran Norodom Sihanouk itu juga mengingatkan, apabila sampai bulan September nanti dia tidak dapat memenuhi undangan tersebut, jangan dipersalahkan. Sementara itu PM Hun Sen juga menjawab, apabila sampai saat itu Pangeran belum juga kembali ke Kamboja, semoga jangan menentanginya (*Kompas*, 3 Mei 1989); (7) dia dan Pangeran Norodom Sihanouk setuju agar Konperensi Internasional tentang Kamboja itu sekali diselenggarakan di Jakarta dan sekali berlangsung di Paris; (8) paling tidak terdapat enam negara peserta konperensi itu, yakni dua negara nonblok, dua negara sosialis dan dua negara Barat. Dua negara nonblok itu mungkin Indonesia dan India; (9) sebelum berlangsung Konperensi Paris itu, dia akan bertemu terlebih dahulu dengan Pangeran Norodom Sihanouk di Paris tanggal 24 Juli 1989, yang kemudian disusul dengan pertemuan empat faksi juga di Paris tanggal 25 Juli 1989; (10) dalam Konperensi Internasional itu akan ditentukan komposisi ICC atau ICM; (11) dalam pembicaraan itu, Pangeran Norodom Sihanouk tampak lebih sungguh-sungguh dan tidak lagi mengusulkan pembubaran pemerintahan Kamboja bantuan Vietnam (PRK) serta dapat menerima pembentukan ICC atau ICM daripada IPKF. Pangeran itu justru lebih serius daripada Son Sann; (12) apabila melalui pemilihan umum itu rakyat menghendaki pembubaran PRK, dia tidak berkeberatan; (13) SNC berdiri tanpa campur tangan CGDK maupun PRK. Hal ini berarti selama SNC ada, PRK tetap ada untuk sekedar melakukan kegiatan sosial ekonomi dan PRK otomatis akan bubar bila telah terbentuk pemerintahan Kamboja hasil pemilihan umum (*Antara*, 3 Mei 1989).

Sementara itu setelah mengadakan pembicaraan terpisah dengan Son Sann, yang juga menyertai Pangeran Norodom Sihanouk, PM Hun Sen menjelaskan bahwa: (1) terdapat beberapa perbedaan pendapat antara Pangeran Norodom Sihanouk dan Son Sann; (2) Son Sann tetap menginginkan pembubaran PRK, dan sebaliknya menginginkan terbentuknya pemerintahan koalisi empat partai untuk mengawasi pemilihan umum. Son Sann juga tetap menginginkan adanya IPKF dan menolak perubahan konstitusi sebelum dilangsungkan pemi-

lihan umum (*Suara Karya*, 3 Mei 1989); (3) pembicaraannya dengan Son Sann agak alot. Son Sann bukan PM CGDK tetapi hanya sebagai salah satu pemimpin kelompok di Kamboja (*Kompas*, 3 Mei 1989).

Sesuai mengadakan pertemuan tanggal 3 Mei 1989, Pangeran Norodom Sihanouk mengatakan bahwa: (1) dia bersedia kembali ke negaranya apabila seluruh permintaannya dipenuhi, yakni penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja dan berbagai modifikasi pada konstitusi baru, terutama yang menyangkut peran partai. Konstitusi baru harus menjamin adanya sistem pemerintahan multipartai, bukan pemerintahan satu partai seperti sekarang ini. Pasal yang berbunyi "Partai Revolusioner adalah partai utama" diganti menjadi "Kamboja menggunakan sistem multipartai." Di samping itu Hun Sen agar memodifikasi pemerintahannya dengan mengikutsertakan wakil-wakil keempat faksi Kamboja. Di samping itu, Hun Sen agar menerima kondisi gencatan senjata dan komposisi pasukan seperti sekarang ini; (2) Khmer Merah harus diajak bergabung ke dalam pemerintahan baru di Kamboja, tetapi apabila Khmer Merah menolak akan ditinggalkan dan dia akan membentuk pemerintahan tiga faksi; (3) ia setuju bantuan asing untuk kelompoknya dihentikan asal penarikan pasukan Vietnam sungguh-sungguh dilaksanakan, oleh sebab itu penarikan pasukan itu harus dimonitor sungguh-sungguh. Untuk itu dia setuju usul Hun Sen mengenai pembentukan ICM sebagai pemantau (*Suara Karya*, 5 Mei 1989); (4) Hun Sen tampaknya bersedia memperhatikan usulnya, bahkan Hun Sen bersedia mengirimkan isi konstitusi itu untuk dipelajarinya; (5) dia menolak pemilu yang dilaksanakan oleh SNC. Pemilihan umum harus diselenggarakan oleh pemerintah sementara empat pihak. Lebih baik menjadi raja seumur hidup di pengasingan daripada harus mengikuti pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Hun Sen (*Antara*, 3 Mei 1989). Namun dia juga menilai bahwa pertemuannya dengan Hun Sen kali ini telah menghasilkan kemajuan yang nyata, bahkan lebih maju daripada JIM II. Baru pada bulan November 1989, dia dapat memutuskan untuk kembali atau tidak ke Kamboja (*Antara*, 3 Mei 1989).

Pada tanggal 4 Mei 1989, Menlu Ali Alatas sebagai Ketua JIM mengatakan kepuasannya atas hal-hal yang telah dicapai dalam pembicaraan Jakarta tanggal 2-3 Mei yang lalu itu (*Suara Karya*, 5 Mei 1989). Namun sejumlah pengamat politik berpendapat bahwa perbedaan pendapat di antara mereka tentang masalah-masalah yang mendasar masih terlalu luas. Salah satu di antaranya adalah perbedaan pendapat tentang pembentukan

pemerintahan sementara empat pihak, yang oleh CGDK disebut Pemerintah Koalisi Sementara Empat Pihak Persatuan Nasional. Sihanouk dan kawan-kawannya berpendapat bahwa PRK hanya suatu partai politik seperti faksi-faksi lain dalam CGDK. Sebaliknya PRK menginginkan agar dua faksi nonkomunis dalam CGDK (KPNLF dan Funcinpec) menyerah kepada pemerintah PRK. PRK juga tidak dapat menerima Khmer Merah karena telah melakukan pembantaian massal terhadap rakyat Kamboja. Keikutsertaan Khmer Merah dalam pemerintahan sementara empat faksi juga akan memberikan kesempatan padanya untuk berkuasa di Kamboja kembali. Sebaliknya kelompok perlawanan menghendaki keikutsertaan Khmer Merah, dengan alasan untuk menghindari pembantaian massal lagi (*Antara*, 5 Mei 1989).

Selanjutnya Menlu Ali Alatas mengatakan: (1) Presiden Soeharto mengharapkan pertemuan Paris akan lebih maju dari pertemuan Jakarta; (2) Pangeran Norodom Sihanouk dan PM Hun Sen menyerahkan sepenuhnya kepada Indonesia dan Perancis untuk berkonsultasi guna menentukan siapa yang lebih dahulu menjadi penyelenggara konperensi internasional itu; (3) Indonesia tidak pernah mempunyai ambisi untuk mendominasi penyelesaian masalah Kamboja. Tetapi sebagai Ketua JIM Indonesia mengharapkan, segala sesuatu yang menyangkut konperensi internasional tentang Kamboja merupakan hasil konsensus JIM, sebab JIM sendiri menegaskan, konperensi semacam itu penting sebagai kelanjutan JIM sendiri (*Antara*, 5 Mei 1989).

Sementara itu PM Hun Sen mengatakan kepada para wartawan di Jakarta tanggal 4 Mei 1989 bahwa: (1) usahanya merangkul Sihanouk masuk ke dalam suatu aliansi Sihanouk-Hun Sen merupakan usaha untuk menciptakan situasi baru, agar tercapai penyelesaian menyeluruh di Kamboja. Untuk itu dia membuka pintu bagi Sihanouk dan beberapa pembantunya tertentu untuk masuk ke dalam pemerintahan Phnom Penh, sehingga terbentuk persekutuan politik dan militer untuk memojokkan Khmer Merah; (2) bila persekutuan ini tercapai, Muangthai maupun RRC harus juga menentukan sikap atas Khmer Merah, Muangthai dapat menentukan sikap sendiri, bebas dari tekanan RRC; (3) koalisi CGDK dengan bantuan asing terbukti tidak dapat membalikkan situasi di Kamboja. Sebaliknya jika suatu pemerintah yang efektif, yang menguasai keadaan Kamboja sepenuhnya, bersekutu dengan seseorang yang mendapat dukungan internasional, maka situasinya akan berubah samasekali; (4) selanjutnya persekutuan atau aliansi ini akan menarik dua kelompok

lainnya, Khmer Merah dan KPNLF, sehingga terjadi koalisi empat kelompok. Tetapi koalisi empat kelompok ini tidak dapat sekaligus terwujud, karena Khmer Merah selalu memvetonya; (5) aliansinya dengan Sihanouk itu ibarat dua roda depan sebuah mobil, yang berfungsi menarik dan menentukan arah mobil. Kedua roda depan itu sekarang telah terpasang, tetapi sekiranya belum dikencangkan; (6) dia berusaha menciptakan kondisi yang memungkinkan Sihanouk bergabung dengannya. Sihanouk diijinkan membawa pengawal pribadinya bila dia tidak percaya pada pengamanan yang dilakukan oleh pasukan PRK; (7) konstitusi Kamboja akan ditinjau sebagaimana diusulkan oleh Sihanouk dan amandemen akan dilakukan, sehingga tercapai kesepakatan dengan Sihanouk; (8) pihaknya akan memberikan suaranya dalam pemilihan umum yang akan datang agar Sihanouk terpilih sebagai Kepala Negara Kamboja (*Kompas*, 5 Mei 1989).

Sedangkan pada tanggal 3 Mei 1989, Son Sann mengatakan bahwa: (1) masih terdapat berbagai perbedaan mendasar antara CGDK dan Pemerintah Phnom Penh pimpinan Hun Sen; (2) CGDK menolak mengakui PRK beserta konstitusinya, karena merupakan konstitusi komunis yang diciptakan di bawah penguasaan asing (Vietnam) tanpa melalui proses pemungutan suara; (3) pembentukan Pemerintahan Koalisi Empat Partai tidak ada masalah, asalkan PRK bersedia dianggap hanya sebagai suatu kesatuan politik dan apa yang dinamakan sebagai Konstitusi itu hanya berlaku bagi intern partai itu; (4) pihaknya mengusulkan pembentukan Pemerintahan Koalisi Sementara Empat Partai Persatuan Nasional yang bertugas menyiapkan pemilihan umum yang bebas di bawah pengawasan internasional yang efektif, sebaliknya Hun Sen tetap mempertahankan PRK dan tidak mengikutsertakan Khmer Merah (*Antara*, 3 Mei 1989); (5) Hun Sen tidak tertarik pada penyelesaian aspek internal masalah Kamboja, tidak lagi menyebut rujuk nasional dan justru sebaliknya menyiapkan perang saudara setelah dilakukan penarikan pasukan Vietnam secara terselubung atau bersyarat (*Angkatan Bersenjata*, 5 Mei 1989).

Menanggapi rencana Konperensi Internasional tentang Kamboja di Paris itu, Menlu Ali Alatas mengatakan kepada para wartawan di Jakarta tanggal 27 April 1989 bahwa konperensi internasional itu penting dan perlu diselenggarakan, akan tetapi akan lebih baik bila dilangsungkan sesudah tercapai kemajuan dalam rangka JIM. Konperensi internasional yang tanpa persiapan dikhawatirkan akan mengalami kegagalan, dan pada akhirnya hanya merupakan suatu proses kemunduran

bagi penyelesaian masalah Kamboja (*Suara Karya*, 28 April 1989).

Di samping itu, dalam rangka menanggapi usul Vietnam untuk menghidupkan kembali ICCI yang dibentuk di Jenewa, Indonesia dan India sependapat dengan usul Vietnam, meskipun Pangeran Sihanouk menolaknya (*Merdeka*, 1 Mei 1989).

B. PERBEDAAN PENDAPAT DI ANTARA FAKSI-FAKSI

Pada tanggal 3 Maret 1989, Menlu Vietnam, Nguyen Co Thach, dan PM Muangthai, Chatichai Choonhavan, menghimbau faksi Kamboja untuk mengadakan perundingan lagi guna mengakhiri perang Kamboja (*Antara*, 5 Maret 1989). Tetapi himbauan ini ditolak oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Dia menyatakan bahwa Hun Sen adalah Quisling, pengkhianat, yang tidak mengerti bahasa kemerdekaan nasional Kamboja (*Antara*, 5 Maret 1989).

Pada tanggal 3 Maret 1989, Pangeran Norodom Ranariddh bahkan mengatakan bahwa: (1) pertemuan tingkat regional mengenai Kamboja agar dibatalkan dan sebagai gantinya diselenggarakan suatu konperensi internasional yang disponsori PBB; (2) JIM II itu merupakan suatu kegagalan, oleh sebab itu untuk mengadakan pembicaraan selanjutnya diperlukan dua persyaratan, yakni: (a) Hun Sen harus menyetujui bahwa pembicaraan itu untuk membahas suatu penyelesaian dan bukan untuk mempublikasikan rezimnya; (b) tempat perundingan harus di negara netral; (3) negara-negara anggota ASEAN, Vietnam, Laos, negara-negara anggota tetap DK PBB, India, Jepang, dan Australia agar mengambil bagian dalam konperensi internasional itu (*Antara*, 5 Maret 1989).

Pernyataan Pangeran Ranariddh tentang JIM itu tampaknya merupakan sikap yang kurang setuju dengan formula Jakarta. Indonesia yang menjadi tuan rumah JIM I dan JIM II dianggap lebih dekat dengan Vietnam dan sekutu-sekutunya (*Antara*, 5 Maret 1989). Ketidakhadiran Pangeran Norodom Sihanouk pada JIM II tampaknya merupakan suatu bentuk pemboikotan atas pertemuan itu pula (*Antara*, 5 Maret 1989).

Diketahui bahwa Hanoi dan Phnom Penh justru menolak peranan PBB karena organisasi dunia ini mengakui CGDK pimpinan Pangeran Norodom Sihanouk.

Sampai saat ini, CGDK juga masih tetap mengisi kedudukan Kamboja di PBB (*Antara*, 5 Maret 1989).

Menanggapi ketidaksenangan dunia internasional terhadap rezim Pol Pot, Pangeran Norodom Sihanouk mengatakan di Beijing tanggal 5 Maret 1989 bahwa dia telah menerima jaminan dari RRC dan Khmer Merah mengenai tidak akan berkuasanya kembali faksi Pol Pot di Kamboja (*Antara*, 6 Maret 1989).

Dalam sebuah wawancara dengan televisi Yugoslavia, yang juga disiarkan dalam radio Demokrasi Kampuchea Khmer Merah tanggal 16 Maret 1989, pemimpin Khmer Merah, Khieu Samphan, mengatakan bahwa: (1) manakala tercapai penyelesaian damai di Kamboja, Khmer Merah tidak akan memonopoli kekuasaan. Kelompoknya menginginkan rekonsiliasi nasional; (2) rekonsiliasi tidak mungkin hanya dalam kerangka negara Demokrasi Kamboja Khmer Merah; (3) apabila ingin menormalisasi hubungan dengan RRC, Uni Soviet harus mengambil peranan untuk ikut menyelesaikan konflik Kamboja (*Antara*, 17 Maret 1989).

Selanjutnya pada tanggal 16 April 1989, Khieu Samphan meminta kepada para negara pendukung Pemerintah Perlawanan untuk mendesak agresor Vietnam agar mengakhiri pendudukannya atas Kamboja (*Antara*, 17 April 1989).

Sementara itu para pemimpin Koalisi Perlawanan Kamboja yang terdiri atas Pangeran Norodom Sihanouk, Khieu Samphan (Khmer Merah) dan Son Sann (KPNLF) mengadakan pembicaraan (rapat kerja) di Beijing tanggal 12 Maret 1989 mengenai usaha menggalkan perjuangan melawan tentara Vietnam di Kamboja, untuk memperkuat persatuan, solidaritas dan kerjasama di antara kelompok-kelompok perlawanan Kamboja serta menyatukan pandangan dalam rangka persiapan KTT Paris (*Suara Karya*, 13 Maret 1989). Pernyataan bersama tanggal 14 Maret 1989 menegaskan bahwa: (1) mereka sepakat untuk membentuk Dewan Tertinggi Pertahanan Nasional guna mempertahankan kerjasama; (2) 21.000 tentara Sihanouk, 40.000 tentara Khmer Merah dan 10.000 tentara Son Sann kini berada di bawah pimpinan Sihanouk. Namun demikian masing-masing pasukan itu tetap mempertahankan beberapa otonomi (*Kompas*, 15 Maret 1989); (3) seandainya penyelesaian politik Kamboja tercapai, pasukan gabungan itu akan dikurangi sampai menjadi 10.000 tentara untuk mewakili Angkatan Bersenjata Kamboja Bersatu (*Antara*, 15 Maret 1989).

Pada kesempatan itu, Pangeran Norodom Sihanouk menegaskan pula bahwa: (1) wakil-wakil tiga faksi Kamboja dan pemimpin rezim Phnom Penh akan bertemu di Paris, bulan April 1989. Tetapi kapan tanggalnya tidak dijelaskan; (2) KTT RRC-Uni Soviet diharapkan mendesak Vietnam dan Hun Sen untuk menerima pengawasan PBB atas penarikan mundur pasukan Vietnam dan pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintah sementara semua partai (*Kompas*, 15 Maret 1989).

Rapat Kerja di Beijing ini menarik untuk diperhatikan karena diselenggarakan beberapa hari setelah PM Hun Sen membeberkan kemenangan kelompoknya. Penegasan yang disampaikan di Kompong Son itu menyebutkan antar lain: (1) pemerintahnya telah mencatat beberapa kemenangan diplomatik dalam beberapa bulan terakhir ini; (2) harga diri pemerintah Phnom Penh semakin tinggi setelah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Pangeran Norodom Sihanouk, JIM II dan kunjungannya ke Muangthai pada bulan Januari 1989; (3) meningkatnya hubungan Kamboja-Muangthai dan fleksibilitas kebijaksanaan Muangthai telah mengkhawatirkan apa yang disebut Pemerintahan Koalisi Tiga Faksi (*Suara Karya*, 13 Maret 1989).

Sementara itu, Pangeran Ranariddh berada di AS, pada awal bulan Maret 1989 untuk meminta bantuan militer. Pada tanggal 17 Maret 1989, Pangeran Ranariddh menegaskan bahwa: (1) pemerintah dan Kongres AS menyatakan untuk memberikan dukungan atas semua permintaannya. Bantuan non-militer AS akan ditingkatkan dari US\$5 juta menjadi US\$7 juta. Meskipun demikian bagaimana rincian bantuan militer AS tidak jelas; (2) keikutsertaan Khmer Merah dalam Pemerintahan Sementara Kamboja merupakan suatu sikap yang realistis. Tidak ada rakyat Kamboja yang setuju berbagi kekuasaan dengan Pol Pot dan kawan-kawannya tetapi realitas menunjukkan adanya dua kelompok komunis dan dua kelompok non-komunis; (3) CGDK harus memperkuat posisinya untuk menghadapi sikap Vietnam yang semakin keras; (4) CGDK telah banyak memberikan konsesi, sebaliknya Vietnam justru berusaha mengulur-ulur waktu penarikan pasukannya, yang semula dijadwalkan menjelang bulan September 1989 diundur sampai bulan Desember 1990; (5) JIM II tidak gagal, meskipun tidak berhasil mencari penyelesaian berbagai masalah penting, seperti penentuan jadwal, mekanisme pengawasan internasional dan komposisi Pemerintahan Sementara Empat Faksi di Kamboja. Akan tetapi JIM harus merintis jalan berikutnya, yakni suatu Konperensi Internasional tentang Kamboja di bawah pengawasan PBB (*Antara*, 18 Maret 1989).

Pada tanggal 17 Maret 1989, Pangeran Norodom Sihanouk menegaskan kembali peranannya dalam Dewan Tertinggi Pertahanan Nasional sebagai berikut: (1) dewan itu bukan Komando Tinggi dan dia sendiri bukan pula panglima tertingginya; (2) meskipun semua pejuang perlawanan Kamboja berada di bawah komandonya, dia tidak berkuasa atas gerilyawan-gerilyawan nasionalisme dan Khmer Merah; (3) dewan itu hanya sebagai koordinasi untuk memperbaiki kemampuan Khmer Merah, gerilyawan nasionalis dan kelompok Sihanoukist dan menghindari bentrokan-bentrokan antar faksi dalam CGDK; (4) bila Khmer Merah akan mengambil alih kekuasaan di Kamboja, pasukannya akan melawan Khmer Merah. Pol Pot tidak boleh berkuasa di Kamboja (*Antara*, 18 Maret 1989).

Selama ini, kelompok nasionalis dan kelompok Sihanoukist sering diserang sendiri oleh Khmer Merah. Untuk menghindari hal ini, maka Dewan Tertinggi Pertahanan Nasional dibentuk. Namun demikian Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Front Pembebasan Nasional Rakyat Khmer (KPNLF), Jenderal Dien Del, mengatakan di Aranyaprathet tanggal 18 Maret 1989 bahwa: (1) meskipun tidak ingin menjadi musuh Khmer Merah dan bersedia bertukar informasi maupun melakukan koordinasi kegiatan, tetapi faksinya menolak bergabung dalam satu komando tempur dengan faksi komunis itu; (2) koordinasi antara Funcinpec dan KPNLF belum lancar, dan justru situasi akan bertambah kacau apabila masih harus berkoordinasi dengan Khmer Merah (*Suara Karya*, 22 Maret 1989). Tetapi yang paling mendasar bagi Jenderal Dien Del sebenarnya adalah sulitnya melupakan jatuhnya Phnom Penh di bawah Lon Nol ke tangan Khmer Merah, karena dia sendiri pernah menjadi panglima suatu divisi Angkatan Bersenjata Kamboja semasa Lon Nol (*Suara Karya*, 22 Maret 1989).

Menanggapi sikap beberapa negara yang ingin tetap memberi bantuan kepada Pemerintahan Perlawanan, pada tanggal 5 April 1989 pemerintah Hanoi menegaskan bahwa pemerintah Phnom Penh mempunyai hak sah untuk meminta bantuan negara-negara lain agar rakyat Kamboja dapat melindungi dirinya (*Antara*, 7 April 1989).

Pada tanggal 6 April 1989, Pangeran Norodom Sihanouk meminta Presiden Perancis, François Mitterand, untuk menyelenggarakan suatu konperensi internasional mengenai Kamboja di Paris (*Antara*, 7 April 1989). Di samping itu pemerintah perlawanan sekali lagi meminta PBB untuk memainkan peranan kunci untuk

mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja (*Antara*, 7 April 1989).

Komunike bersama Vietnam, Laos dan PRK tanggal 5 April 1989 mengatakan: (1) Komisi Pengawasan Internasional mengenai Indocina (ICCI), yang dibentuk di Jenewa tahun 1954, beranggotakan India, Kanada dan Polandia, perlu diaktifkan kembali; (2) Indonesia dan seorang wakil dari Sekjen PBB agar bekerjasama dengan ICCI untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dan menjamin bahwa bantuan militer kepada pihak-pihak yang bertikai di Kamboja telah dihentikan.

India dan Kanada menyambut baik komunike bersama negara-negara Indocina itu (*Antara*, 7 April 1989). Tetapi Pangeran Sihanouk menolak rencana penarikan pasukan Vietnam seperti itu, karena Vietnam bukan pemilik legal Kamboja (*Antara*, 10 April 1989).

Sementara itu PM Hun Sen sekali lagi menegaskan bahwa penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja akan dilakukan pada bulan September 1989, dan tiga bulan sesudahnya akan diselenggarakan pemilihan umum (*Suara Karya*, 26 April 1989).

Sebaliknya, Pangeran Norodom Sihanouk tetap menolak meninggalkan Khmer Merah dan pelaksanaan pemilihan umum yang demikian itu. Sebaliknya dia justru mendesak pembubaran pemerintahan Phnom Penh (PRK) (*Antara*, 29 April 1989).

Dalam usahanya memecahkan masalah Kamboja, Majelis Nasional Phnom Penh mengadakan pertemuan luar biasa tanggal 28-29 April 1989 untuk membahas perubahan beberapa pasal UUD Kamboja. Majelis Nasional itu menyetujui perubahan beberapa pasal UUD Kamboja, antara lain: (1) nama PRK menjadi "Negara Kamboja"; (2) agama Budha menjadi agama negara; (3) penghapusan hukuman mati.

Majelis Nasional menegaskan pula bahwa perubahan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan baru di Kamboja dan memenuhi keinginan rakyat Kamboja untuk mencapai perdamaian dan rujuk nasional (*Antara*, 2 Mei 1989).

PM Hun Sen mengatakan di Phnom Penh tanggal 10 Mei 1989 bahwa: (1) faksi Khmer Merah agar membubarkan pasukannya demi tercapainya perdamaian di Kamboja; (2) dia mengutuk Perancis yang telah memberi bantu militer senilai US\$1,55 juta kepada kelompok Sihanouk (*Merdeka*, 13 Mei 1989); (3) Pol Pot dan Seng Sary harus dihukum mati sebelum konstitusi baru diberlakukan. Mereka akan dikucilkan dari

klausal Konstitusi Kamboja yang baru, yang menghapuskan hukuman mati (*Suara Karya*, 13 Mei 1989).

Pangeran Norodom Sihanouk mengatakan di Beijing tanggal 20 Mei 1989 bahwa Khmer Merah setuju negara Kamboja menjadi negara non-komunis.

Para diplomat Barat di Bangkok berpendapat bahwa sikap Khmer Merah ini merupakan usaha untuk menghapuskan kekhawatiran rakyat Kamboja mengenai keinginannya untuk berkuasa kembali di Phnom Penh. Mereka juga berpendapat bahwa sikap Khmer Merah itu merupakan hasil tekanan Beijing agar mereka memperlunak sikapnya (*Kompas*, 22 Mei 1989).

C. PERANAN UNI SOVIET DAN RRC

Muncul berbagai anggapan bahwa KTT Uni Soviet-RRC bulan Mei 1989 itu dapat membantu menyelesaikan pertikaian di Kamboja. Menanggapi anggapan ini Deputi Menlu Uni Soviet, Igor Rogachev, mengatakan di Bangkok ketika menghadiri sidang ESCAP tanggal 29 Maret 1989 bahwa: (1) meskipun Uni Soviet menyatakan kesiapannya untuk membantu menyelesaikan masalah Kamboja, tetapi negaranya bukan merupakan aktor utama dalam masalah Kamboja; (2) Uni Soviet bukan pada posisinya untuk membuat keputusan akhir atas nama partai-partai di Kamboja; (3) salah satu kunci utama untuk mengakhiri konflik Kamboja itu adalah melanjutkan dialog antara Pangeran Norodom Sihanouk dan PM Hun Sen. Kedua pemimpin ini perlu segera bersatu bahasa untuk menyelesaikan negaranya; (4) di samping itu perlu diingatkan bahwa pemerintah Phnom Penh kini cukup kuat dan dapat hidup terus tanpa perlu melanjutkan perundingan dengan para pemimpin koalisi; (5) meskipun Sihanouk dapat menjadi tokoh utama dalam penyelesaian masalah Kamboja, tetapi ia seorang yang keras kepala, selalu menunda-nunda perundingan damai tentang Kamboja dan menolak bertemu dengan Hun Sen. Justru sikap Pangeran Sihanouk yang demikian itu dapat diartikan sebagai menyerukan untuk dilanjutkannya perang saudara di Kamboja (*Kompas*, 30 Maret 1989); (6) KTT Uni Soviet-RRC bulan Mei mendatang bukan untuk menyelesaikan masalah Kamboja (*Suara Karya*, 30 Maret 1989).

Awal April 1989, Kemlu RRC menyatakan bahwa Beijing tidak akan menghentikan bantuan kepada pemerintah perlawanan kecuali telah terbukti bahwa semua pasukan Vietnam telah ditarik mundur dari Kamboja. Di samping itu, RRC juga menghendaki agar

penarikan pasukan itu diawasi oleh PBB (*Antara*, 7 April 1989).

Masalah keikutsertaan Khmer Merah dalam pemerintahan di Phnom Penh merupakan salah satu masalah yang belum mendapat kesepakatan KTT Uni Soviet-RRC itu. Dalam suatu konperensi pers di Beijing tanggal 17 Mei 1989, Presiden Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, menegaskan bahwa: (1) KTT Uni Soviet-RRC tidak mungkin memecahkan masalah Kamboja secepat mungkin; (2) penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja mungkin dapat membantu menyelesaikan masalah Kamboja, tetapi orang Kamboja sendirilah yang dapat mengakhiri konfliknya itu (*Antara*, 18 Mei 1989).

D. RENCANA KTT PARIS GAGAL

Pada awal Maret 1989, PM PRK, Hun Sen, menyampaikan surat undangan kepada Pangeran Norodom Sihanouk untuk mengadakan KTT Paris antara para pemimpin faksi Kamboja guna mencari penyelesaian damai tentang masalah Kamboja.

Dalam jawabannya tertanggal 10 Maret 1989, Pangeran Norodom Sihanouk menyatakan akan mengirim Direktur Kabinetnya dan seorang wakil lain untuk mengadakan pembicaraan dengan PM Hun Sen mengenai rencana KTT Paris. Juga ditegaskan bahwa kapan saja KTT dapat dilaksanakan asal semua setuju (*Suara Karya*, 13 Maret 1989).

Menurut rencana KTT ini akan diselenggarakan di Paris tanggal 10 April 1989, tetapi gagal diselenggarakan karena tidak jelas siapa-siapa yang menjadi wakil-wakilnya.

V. HUBUNGAN ASEAN-VIETNAM

Kebijakan ASEAN tentang pengungsi Indocina adalah sebagai berikut: (1) sejak 14 Maret 1989 warga Vietnam yang mencari suaka dan mendarat di wilayah ASEAN tidak secara otomatis memenuhi syarat untuk dimukimkan kembali di sebuah negara ketiga; (2) langkah itu untuk mencegah arus eksodus besar-besaran keluar Vietnam sebelum dilaksanakan Konperensi Jenewa 13 Juni 1989; (3) Konperensi Jenewa akan lebih ketat lagi memberikan status pengungsi bagi manusia perahu Vietnam; (4) hanya mereka yang keluar Vietnam karena ditindas diakui sebagai pengungsi dan lainnya akan dikembalikan ke negaranya (*Kompas*, 15 Maret 1989).

Para Penulis



- **JASIN, Anwar,**
Sarjana Muda Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia (1985), Master of Education, University of Sydney (1962) dan Doktor Pendidikan, Fakultas Pasca Sarjana, IKIP Jakarta (1983). Sejak tahun 1986 hingga sekarang Staf Ahli Menteri P dan K, Bidang Pengembangan Kurikulum.
- **JONI, T. Raka,**
Lulus Sarjana Muda FKIP Universitas Airlangga, Malang (1961); Master of Science in Elementary Education, State University College at Buffalo, N.Y. (1964), dan pada tahun 1969-1970 bertugas belajar berturut-turut pada Educational Testing Service, Princeton, N.Y., State University of New York at Albany dan Centro Intercultural de Documentation, Guarnavaca, Mexico. Mendapat gelar Doktor dalam Psikologi Pendidikan IKIP Malang (1972). Sejak tahun 1976 mengajar pada Program Doktor, yang kemudian menjadi Fakultas Pasca Sarjana IKIP Malang. Pada tahun 1980, diangkat sebagai Guru Besar IKIP Malang.
- **NAPITUPULU, Washington P.,**
Lulus B-1 Pedagogik, di Jakarta (1954); Sarjana Pedagogik dari Universitas Kristen Indonesia, Jakarta (1959); dan memperoleh gelar Doctor of Education dari Stanford University, California, USA (1962), Guru Besar Pendidikan di IKIP Jakarta. Pekerjaan utama sekarang adalah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- **PRANARKA, A.M.W.,**
Memperoleh gelar Sarjana Filsafat dari Athenaeo, Poona, India (1965); Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1969) dan gelar Doktor dalam Ilmu Hukum, dari universitas yang sama tahun 1984. Sekarang Anggota Dewan Direktur CSIS dan Ketua Departemen Politik, CSIS Jakarta dan Ketua Konsorsium Lembaga Pengkajian Kebudayaan Sarjanawiyata, Tamansiswa Yogyakarta.
- **SUPRIADI, Dedi,**
Sarjana Pendidikan dari IKIP Bandung (1982); Magister Pendidikan, lulus Cum Laude (1985); mendalami studi kreativitas di State University of New York (1986). Doktor Ilmu Pendidikan dari IKIP Bandung, lulus Cum Laude (1989). Koresponden Harian Suara Karya sejak 1981 dan Anggota Dewan Redaksi Mimbar Pendidikan, IKIP Bandung.
- **SURYOHADIPROJO, Sayidiman,**
Lulusan Akademi Militer, Yogyakarta (1948); memperoleh pendidikan Perwira Infanteri, Fort Benning, AS (1952); Sekolah Staf dan Komando, Hamburg, Jerman Barat (1965). Mantan pelbagai posisi penting, antara lain Gubernur Lemhanas (1974-1978), Duta Besar RI di Jepang (1979-1983). Sejak 1983 hingga sekarang Penasihat Menristek, juga menjadi dosen Ketahanan Nasional pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

ISSN 0126-222X